

TESIS

HOAKS DAN KEBEBASAN INFORMASI

**(Studi Kasus Pernyataan Habib Rizieq Syihab Tentang
Lambang Palu Arit di Mata Uang Cetakan Baru pada Media
Online YouTube.com)**

ARMIADI

P1400216020



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU KOMUNIKASI

2018

TESIS

**HOAKS DAN KEBEBASAN INFORMASI (PERNYATAAN HABIB
RIZIEQ SYIHAB TERKAIT LAMBANG PALU ARIT DI MATA UANG
BARU PADA MEDIA ONLINE YOUTUBE.COM)**

Disusun dan diajukan oleh

ARMIADI

Nomor Pokok P1400216020

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **11 Januari 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Dr. Hasrullah, M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



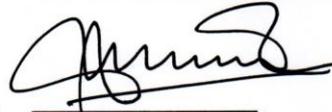
Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.



Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armiadi
Nomor Pokok Mahasiswa : P1400216020
Program studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya pribadi dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 februari 2019



Yang menyatakan

Armiadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala izin dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: HOAKS DAN KEBEBASAN INFORMASI (Studi Kasus Pernyataan Habib Riziek Syihab Tentang Lambang Palu Arit di Mata Uang Cetakan Baru pada Media Online YouTube.com). sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar magister dalam bidang ilmu komunikasi khususnya kajian media pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi yang selalu menjadi panutan umat Islam sebagai inspirasi dalam setiap langkah dan tindakan yang ingin dicapai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan dalam penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan yang harus dibenahi karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritikan yang bersifat pengembangan dan saran yang membangun agar kedepannya tulisan ini dapat menjadi lebih baik, terkhusus pada wilayah kajian-kajian media komunikasi.

Selama menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian begitu banyak pengalaman dan pembelajaran penulis dapatkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak serta

pribadi yang memberikan andil yang besar selama proses perkuliahan hingga akhir tesis ini:

1. penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Nasrum Machmud Sp.PD selaku orang tua/wali penulis atas segala doa dan didikannya dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar sehingga penulis dapat mencapai pendidikan pada jenjang ini.
2. Rektor universitas Hasanuddin ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A dan segenap jajaran petinggi tingkat universitas yang telah memberikan penulis ruang untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas hasanuddin.
3. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran tingkat fakultas yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di FISIP UNHAS
4. Bapak Dr. Hasrullah M.A selaku komisi penasehat I dan Dr. Muh. Iqbal Sultan, M.Si selaku komisi penasehat II atas bantuan, dukungan, serta telah memberikan arahan, masukan dan saran kepada penulis selama proses bimbingan berjalan hingga selesai.
5. Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc, Prof. Dr. Alimuddin Unde, M.Si, dan Dr. Aswar Hasan, M.Si selaku komisi penguji dalam penelitian ini yang banyak memberikan kontribusi berupa saran, kritikan, dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini.

6. Dosen-dosen pengajar Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin atas segala ilmunya dan motivasinya untuk terus berjuang dalam menyelesaikan studi.
7. Segenap staf akademik Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu perihal pelayanan sehingga proses perkuliahan dan penyelesaian administrasi berjalan dengan lancar.
8. Terima kasih sahabat dan teman kelas Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Khususnya angkatan 2016 atas segala motivasi dan dukungan untuk terus berjuang dalam menyelesaikan tahapan penyelesaian. Kurang lebih 2 tahun waktu menuntut ilmu menjadikan kami berteman melebihi saudara dalam bingkai kebersamaan.
9. serta sema pihak yang namanya tidak tercantum dalam tesis ini, namun juga banyak memberikan kontribusi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih ini tidak cukup mewakili semua apa yang telah penulis dapatkan selama ini, penulis hanya dapat berdoa kepada Allah SWT agar kiranya dapat membalas segala jasa dan kebaikan dalam proses penyelesaian tulisan ini dan semoga hasil peneitian ini memberikan manfaat bagi kita semua dan diri pribadi penulis sendiri.

Makassar, 9 Januari 2018

Penulis

ABSTRAK

ARMIADI. Hoaks dan kebebasan informasi - Studi Kasus Pernyataan Habib Riziek Syihab Tentang Lambang Palu Arit di Mata Uang Cetakan Baru pada Media Online YouTube.com(dibimbing oleh Hasrullah dan Muh. Iqbal Sultan).

Hoaks yang belakangan menjadi kata yang populer untuk diucapkan adalah sebuah fenomena yang menyerang hampir semua lini masyarakat global melalui media-media yang mempunyai akses untuk menyajikan informasi lewat internet (daring). Kemunculan jejaring sosial makin membuka lebar kanal demokrasi dan kebebasan berpendapat melalui dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pesan-pesan Habib Rizieq Syihab terkategori hoaks atau kebebasan informasi; (2) respon pemerintah terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab; (3) penafsiran pengguna media sosial dan media online terkait regulasi pemerintah tentang hoaks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis Roger Fowler dkk. Penelitian ini dilakukan di youtube.com. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama berupa hasil observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan dokumen tertulis terkait dengan judul dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pesan yang disampaikan Habib Rizieq Syihab adalah salah satu bentuk informasi bohong (Hoaks) karena pesan yang disampaikan dengan cara mengobok-obok emosi masyarakat (Post-truth) dengan menggunakan isu PKI melalui media sosial youtube tidak terbukti kebenarannya. (2) pemerintah menyatakan bahwa lambang yang dipersepsikan sebagai palu arit adalah salah satu bentuk sistem pengamanan uang (rectoverso). (3) pengguna media sosial dan media

online menafsirkan bahwa regulasi pemerintah tentang hoaks harus ditegakkan tanpa mencederai kebebasan berpendapat itu sendiri.

Kata Kunci: Hoaks, Kebebasan Informasi, Post-truth, media sosial, media online, youtube.com.

ABSTRACT

ARMIADI. Hoax and freedom of information - Case Study of Habib Rizieq Syihab's Statement on the Hammer of Arit in the New Printed Currency on YouTube.com Online Media (Supervised by Hasrullah and Muh. Iqbal Sultan).

Hoax which later became a popular word to say is a phenomenon that attacks almost all lines of global society through media that have access to present information via the internet (online). The emergence of social networks increasingly opens the channel of democracy and freedom of opinion through cyberspace. This study aims to find out (1) Habib Rizieq Syihab's messages categorized as hoax or freedom of information; (2) the government's response to the messages conveyed by Habib Rizieq Syihab; (3) interpretation of users of social media and online media regarding government regulations regarding hoaxes.

This study uses a qualitative approach with the type of critical discourse analysis research Roger Fowler et al. This research was conducted on youtube.com. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is the main data in the form of direct observations. While secondary data is obtained through literature studies and collection of written documents related to the title of this study.

The results of this study indicate that (1) the message conveyed by Habib Rizieq Syihab is one form of hoax information because the message

conveyed through the post-truths of using the PKI issue through social media youtube is not proven true . (2) the government states that the symbol perceived as a hammer and sickle is one form of a money security system (rectoverso). (3) users of social media and online media interpret that government regulations on taxation must be enforced without injuring freedom of opinion itself.

Keywords: Hoax, Freedom of Information, Post-truth, social media, online media, youtube.com.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Konsep	13
1. Hoaks.....	13
2. Jenis-jenis Informasi Hoaks	15

3. Ciri-ciri Hoaks.....	16
4. Kebebasan Informasi	17
5. YouTube.com.....	19
6. Demokrasi.....	23
7. Media Sosial	25
a. Pengertian Media Sosial.....	25
b. Jenis-jenis Media Sosia.....	26
8. Media Online.....	28
B. Landasan Teori	31
1. Teori Agenda Setting	31
2. Teori Konstruksi Realitas Sosial	31
3. Teori Media Demokratik-Partisipan.....	33
a. Prinsip-prinsip Utama Teori Media	33
C. Penelitian yang Relevan	35
D. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37

B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Pengecekan Validitas Temuan atau Kesimpulan	40
G. Tahap-tahap penelitian dan jadwalnya (waktu penelitian)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Habib Rizieq Syihab.....	43
1. Riwayat Pendidikan	43
2. Karier	44
B. Roger Fowler	45
C. Sejarah PKI	47
D. Hasil Penelitian	61
1. Aspek Kosakata.....	64
a. Kosakata: Membuat Klasifikasi.....	64
b. Kosakata: Membatasi Pandangan.....	65
c. Kosakata: Pertarungan Wacana	65

d. Kosakata: Marjinalisasi.....	66
2. Aspek Tata Bahasa.....	67
a. Efek bentuk kalimat pasif: Penghilangan Pelaku	67
b. Efek nominalisasi: Penghilangan Pelaku	67
c. Komentar Netizen	69
D. Hoaks atau Kebebasan Informasi	72
E. Respon Pemerintah	73
F. Penafsiran Pengguna Media Sosial dan Media Online	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran dan perasaannya. Dalam era teknologi informasi saat ini, mode komunikasi yang kita jalani telah diperantarai Internet dan telah bergerak secara cepat menuju apa yang disebut dengan *computer-mediated communication (CMC)* atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Dalam konteks ini, computer mediated communication (CMC) dipandang sebagai integrasi teknologi komputer dengan kehidupan kita sehari-hari.

Di zaman yang serba canggih ini sebut saja zaman ITE, komunikasi terus mengalami inovasi hingga terciptalah dan berkembang pesat menjadi sesuatu yang sering kita sebut “media sosial” dan “media online”. Kemunculan jejaring sosial makin membuka lebar kanal demokrasi dan kebebasan berpendapat melalui dunia maya. Hal tersebut menjadi wajar mengingat kemampuan media sosial dan media online yang langsung membidik setiap individu serta mampu menembus batas ruang dan waktu. Dengan segala kelebihan fitur yang dimilikinya, media sosial dan media online mampu menyebarkan berita atau peristiwa secara mudah, cepat, dan meluas.

Media massa saat ini bisa dikatakan bagian dari kebutuhan primer manusia. Tidak bisa dipungkiri, media massa merupakan alat yang digunakan manusia dalam kesehariannya, baik untuk mendapatkan informasi, hiburan, maupun edukasi. Selain itu, media massa dapat menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya di seluruh dunia.

Media massa sendiri merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2002).

Salah satu dampak positif kemajuan teknologi informasi adalah mudahnya membuat dan mempublikasikan konten. Nyaris tanpa batasan. Namun di sisi lain, segala kemudahan itu kemudian dapat digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita dan informasi bohong. Akibatnya, media sosial dan online kini dipenuhi berita informasi palsu (hoaks), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Bahkan, saking maraknya seolah-olah tulisan-tulisan tersebut yang datang menghampiri kita, bukan lagi kita yang menghampiri mereka. Parahnya lagi, terkadang kita belum sempat memahami materi informasi, tetapi reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu. Informasi adalah mata uang demokrasi dalam peredarannya, dalam peredaran itulah informasi dapat menjadi disinformasi, informasi tiba dengan pesan yang keliru, entah karena diselewengkan atau karena ketakcukupan nalar publik untuk mengolahnya.

Kita telah tiba pada Era *Post-truth*, Kamus Oxford menjadikan *post-truth* sebagai “Word Of the year” tahun 2016. Berdasarkan keterangan editornya, jumlah penggunaan istilah tersebut di tahun 2016 meningkat 2000 persen bila dibandingkan 2015. Kamus Oxford sendiri mendefinisikan istilah tersebut sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Terjadi manipulasi emosi-emosi terdalam masyarakat, dengan penggunaan teknik-teknik persuasi, dari retorika biasa hingga fitur terbaru dalam media sosial dan media online. Era ini adalah era dimana fakta semakin menjadi hal yang tidak penting. Semua hal digerakkan oleh sentimen emosi, Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoaks punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Dalam era ini, batas antara yang benar dan dusta menjadi kabur.

Perkembangan teknologi media, khususnya media digital (internet), telah mengharuskan sebuah upaya memikirkan ulang konsep-konsep dasar demokrasi itu sendiri, tidak saja karena demokrasi selalu membutuhkan media dalam cara kerja komunikasinya, tetapi media itu sendiri dapat mengubah atau mentransformasikan sistem demokrasi itu sendiri. Kedatangan abad digital telah membuka ruang bagi terbentuknya satu bentuk khusus demokrasi, yang disebut “demokrasi media” dan terakhir “demokrasi digital”.

Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada dibalik media tersebut, khususnya kepentingan

terhadap informasi yang disampaikan. Setidaknya ada dua kepentingan utama dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi dan kekuasaan, yang membentuk isi media, informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Namun menjadi aneh kemudian ketika kepentingan publik justru menjadi terabaikan atau terlupakan. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang publik, malah menjadi ruang kepentingan bagi individu atau kelompok atas nama kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang menyebabkan media tidak lagi objektif dalam menyajikan informasi, kepentingan-kepentingan ini menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran atau kebenaran palsu, menyampaikan objektifitas atau subjektifitas, bersifat netral atau berpihak, merepresentasikan fakta atau memelintir fakta, menggambarkan realitas atau mensimulasi realitas. Disatu pihak ketika ranah publik dikuasai oleh politisasi informasi, yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik, media menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa dengan menguasai ruang publik. Di pihak lain ketika dikuasai oleh kepentingan ekonomi politik informasi, informasi menjadi alat mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi publik, sebagai satu dasar dari prinsip kapitalisme.

Media sosial dan online memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-

uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial dan online akan digunakan secara positif atau negatif. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lain malah bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (hoaks) sedang marak menghiasi jagad maya Indonesia. Hal ini berlangsung khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial dan media online.

Ada pengadu domba bermotif “dendam pribadi” mengungkapkan kekesalannya atau kekecewaannya terhadap sesuatu di media sosial dalam bentuk status. Bahkan, ia terang-terangan “menyebut merek” sesuatu yang telah membuatnya kesal atau kecewa, bahkan sampai menjelek-jelekannya. Alhasil, banyak orang yang membaca status tersebut menjadi terpancing untuk menghujat aibnya atau pihak yang merasa tersinggung pun melaporkannya ke aparat penegak hukum atas dasar pencemaran nama baik.

Lalu ada pengadu domba bermotif “bisnis” yang membuat akun palsu dan memberikan tema atau judul konten yang dikemas sedemikian rupa hebohnya sehingga memancing perhatian banyak orang untuk

membacanya. Sadar atau tidak sadar para pembaca awam pun terhipnotis, bahkan tergerak hatinya sehingga mengklaim benar konten hoaks tersebut tanpa melakukan klarifikasi terlebih dulu. Alhasil, banyak orang yang menyebarkan hoaksnya sehingga makin banyak orang yang mengakses konten tersebut. Hingga pada puncaknya terjadilah pembicaraan heboh, berlanjut kepada fitnah, dan berujung kepada kericuhan.

Kemudian ada pula pengadu domba bermotif “sensasi” agar keberadaannya diakui layaknya seorang pahlawan. Sadar atau tak sadar orang tersebut melakukan suatu tindakan disertai dengan perkataan yang tidak pantas, lalu menyebarkan hoaksnya. Memang ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai suatu keunikan sehingga menarik banyak perhatian. Namun, tidak sedikit pula orang lain yang tersinggung atau menganggap hal tersebut tabu sehingga menjadi *viral* dan peperangan di media sosial, dan berujung kepada laporan ke aparat penegak hukum atas dasar perbuatan yang tidak menyenangkan.

Yang paling hangat belakangan ini, yaitu pengadu domba bermotif “politik atau kekuasaan”, yang mencoba mempengaruhi publik melalui informasi yang direkayasa sedemikian rupa dan terstruktur, biasanya dalam bentuk kampanye hitam, sehingga menimbulkan pandangan politik yang buruk oleh publik terhadap salah satu pasangan calon, hal ini biasa terjadi pada saat hajatan pesta demokrasi baik di daerah maupun di pusat, tentunya dengan harapan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaannya.

Kegaduhan yang terjadi di media sosial bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan di jagad maya berpotensi mengkonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena jagad maya ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di jagad maya semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial dan online. Sungguh disayangkan bila kemudahan ini secara perlahan-lahan malah menjadi malapetaka bagi para penggunanya.

Hoaks yang belakangan menjadi kata yang populer untuk diucapkan adalah sebuah fenomena yang menyerang hampir semua lini masyarakat global melalui media-media yang mempunyai akses untuk menyajikan informasi lewat internet (daring). Besarnya jumlah pengguna media sosial dan media online di Indonesia memang berpotensi menyebabkan terjadinya ketegangan komunikasi antarpihak. Catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,7 juta. Sementara populasi penduduk Indonesia saat ini 256,2 juta orang. Artinya, jumlah itu setara dengan 51,8

persen dari jumlah penduduk Indonesia dan sekitar 65 persen dari pengguna internet tersebut berada di Pulau Jawa.

Beberapa media utama di tanah air, seperti surat kabar Kompas dan The Jakarta Post, melaporkan dalam pemberitaannya bahwa Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu. sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai “penyakit kanker yang menggerogoti demokrasi”. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu ini, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu (“Unreliable online news”, 2017). Namun demikian kebijakan ini juga dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat (freedom of speech).

Dalam salah satu pernyataannya di media massa, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan bahwa berita palsu yang beredar di media sosial sepanjang hari membawa dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, semakin cepat masalah itu bisa diatasi akan semakin baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita palsu (hoaks) adalah dengan memblokir situs internet (website) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu pertimbangan utamanya adalah isi (content) dari situs bersangkutan bukan afiliasi politik

pengelola situs tersebut. “Sepanjang situs tersebut menyebarkan isi yang melanggar peraturan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” kata Menteri Rudiantara seperti dikutip surat kabar The Jakarta Post (“Govt to continue”, 2017). Sampai dengan bulan Desember 2016, pemerintah telah memblokir 800,000 situs internet, sebagian besar berisi pornografi dan perjudian. Sekitar 85 situs diantaranya adalah situs terkait ajaran radikalisme. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap penyebaran berita palsu. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan penyebaran berita palsu ini.

Hoaks muncul dengan adanya sentimentil atas golongan atau pihak, terkait tindakan atau kebijakannya yang tidak sesuai dengan alur berpikir pihak oposisinya. Hoaks atau berita palsu mengikuti alur berpikir pembacanya yang kira-kira bisa menimbulkan efek sensitivitas yang meningkat entah itu kebencian atau semangat untuk mendukung dengan sajian berita tersebut, lalu berujung pada budaya berbagi melalui media sosial dan media online agar lebih banyak orang yang membaca.

Hoaks dengan ujaran kebencian sangat berbahaya jika itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, atau efek seperti yang diungkap Stanley Cohen sebagai Moral Panic. Moral Panic yang disajikan berita hoaks bisa menjadi pemicu atas tindakan-tindakan anarki pada orang yang mempercayai berita tersebut sebagai kondisi yang harus dicegah. Salah satunya berita tentang keburukan pemimpin suatu negara/daerah yang disajikan media bisa memicu kebencian juga bagi masyarakatnya.

Artinya, alur berpikir masyarakat yang sentimen terhadap suatu golongan semakin dipicu dengan menghadirkan berita-berita palsu terkait golongan tersebut. Hoaks yang dihadirkan melalui media-media yang menyatakan diri sebagai media alternatif (terutama media daring) adalah salah satu bentuk kurangnya pengawasan atas peredaran informasi yang semena-mena disajikan.

Jika berita hoaks berhasil menciptakan kegaduhan di masyarakat maka yang terjadi adalah keresahan sosial yang sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kepentingan kelompoknya. Kelompok kepentingan saat ini selalu menggunakan media sosial dan media online untuk menyebarkan pesan-pesan yang bersifat provokatif. Masih terbayang-bayang beberapa bulan yang lalu hingga saat ini, kita dihingar-bingarkan oleh pemberitaan berbagai media massa terkait kasus-kasus yang erat kaitannya dengan konflik dan krisis kemanusiaan. Sebut saja kasus penyebaran konten penistaan agama (212), konten makar, konten pornografi, hingga terjadilah persekusi di mana-mana. Dalam merespon persoalan semacam itu, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Di sisi lain, persoalan mengatasi kegaduhan di media sosial melalui penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pesan-pesan Habib Rizieq Syihab terkategori hoaks atau kebebasan informasi?
2. Bagaimana respon pemerintah terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Habib Rizieq?
3. Bagaimana regulasi pemerintah tentang hoaks ditafsirkan oleh pengguna media sosial dan media online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pesan-pesan Habib riziek itu hoaks atau sebuah bentuk kebebasan informasi.
2. Untuk mengetahui respon pemerintah terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh habib riziek.
3. Untuk mengetahui bagaimana regulasi pemerintah tentang hoaks ditafsirkan oleh pengguna media sosial dan media online.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap dunia ilmu komunikasi.
2. Diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi acuan literal banyak pihak untuk mewujudkan iklim informasi yang sehat dalam kehidupan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Hoaks

Hoaks adalah sebuah pemberitaan palsu dimana ada usaha untuk menipu atau mengakali pembaca pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar keberadaannya. Hoaks, menurut Lynda Walsh dalam buku "Sins Against Science", istilah hoaks merupakan kabar bohong, istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri, diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Chen et al (2014), menyatakan hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoaks mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Selanjutnya hoaks menurut hoaxes.org pengertian hoax adalah sebagai aktivitas menipu.

Kata hoaks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tidak benar; bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa hoaks adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum

adalah mengklaim sesuatu barang kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/ kejadian sejatinya.

Definisi lain menyatakan hoaks adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online. Hoaks bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoaks beragam tapi pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoaks terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoaks ini dengan cepat tersebar luas. Orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut.

Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoaks memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.

2. Jenis-Jenis Informasi Hoaks

a. *Fake news*: Berita bohong

Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

b. *Clickbait*: Tautan jebakan

Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

c. *Confirmation bias*: Bias konfirmasi

Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

d. *Misinformation*

Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.

e. *Satire*

Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan “This Hour has 22 Minutes”.

f. *Post-truth*: Pasca-kebenaran

Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

g. Propaganda

Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini public

3. **Ciri-Ciri Hoaks**

- a. Sumber beritanya berasal dari pihak yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada tautan ke sumber resmi. Berita tersebut dari situs yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya, apakah perorangan, lembaga, atau lainnya. Atau dari situs yang tidak dapat dipastikan apakah memiliki kredibilitas atau reputasi berita yang cukup baik.
- b. Gambar, foto atau video yang dipakai merupakan rekayasa, atau bahkan tidak nyambung dengan beritanya. Misalnya, hasil editing dari sumber asli yang dibuat asal saja.
- c. Menggunakan kalimat yang provokatif, sehingga mudah memengaruhi pembaca atau pendengarnya.

d. Mengandung unsur politis dan SARA.

4. Kebebasan Informasi

Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Kata kebebasan berasal dari kata bebas yang artinya lepas dari, merdeka, tidak terikat. Sedangkan dalam KBBI, kata kebebasan memiliki arti keadaan bebas; kemerdekaan. Hal ini mengartikan keadaan yang tidak terikat dan bebas dalam berperilaku, bertindak, maupun bersuara.

Informasi adalah suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Informasi adalah kenyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada yang menerimanya. Berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam menyebarkan dan mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Demokrasi mengharuskan adanya kebebasan informasi yang mencakup kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers.

Kebebasan informasi harus pula dibarengi dengan pengetahuan dan pemaknaan yang sehat dari masyarakat akan makna kebebasan itu sendiri, agar tidak sering disalahgunakan dan bahkan bisa berpotensi mengancam proses demokrasi. Menjadi ironi kemudian bahwa kebebasan informasi di lain sisi juga dapat membunuh demokrasi namun disisi lain ketika pemerintah membuat regulasi pembatasan terhadap penggunaan Informasi (UU ITE & KIP) juga dianggap bisa mematikan kebebasan berpendapat oleh masyarakat.

Ciri-ciri kebebasan informasi:

1. Keterbukaan maksimum
2. Kewajiban untuk mengumumkan informasi
3. Memajukan pemerintahan yang terbuka
4. Pembatasan cakupan kekecualian
5. Proses-proses untuk mempermudah pemerolehan informasi

5. YouTube.com

Media berbasis isi ini adalah media yang lebih mengutamakan fungsinya untuk berbagi konten yang dibuat sendiri oleh pengguna (user-created content). YouTube secara khusus dipergunakan untuk mengunggah dan membagikan konten digital berupa video, audio, dan teks, serta terkumpul berdasarkan topik dan tipe konten. YouTube merupakan salah satu situs berbagi video daring (dalam jaringan) terbesar di dunia, diprakarsai oleh tiga orang mantan pegawai PayPal di tahun 2005 untuk membuat media sosial yang dimana pengguna bisa mengunggah video. 3 mantan pegawai Paypal tersebut membuatnya pada tanggal 14 Februari 2005. Awalnya, situs ini merupakan sebuah situs yang dipegang secara independen oleh ketiga pemiliknya yang bernama Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim sebelum akhirnya pada akhir 2006 situs ini dibeli oleh Google. Situs ini memberikan pengguna kebebasan untuk mengunggah konten mereka sendiri seperti video klip, klip TV, video musik, hingga video blogging dengan teknologi HTML5 dan Adobe Flash Video yang digunakan. Dalam prakteknya, pengguna situs ini tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga media korporat semacam BBC, CBS, Hulu, Vevo, dan berbagai macam organisasi lainnya. Domain YouTube.com pertama kali aktif pada tanggal 14 Februari 2005 dan dalam beberapa bulan situs tersebut mulai berkembang lebih jauh. Para perancang situs tersebut memberikan sebuah preview situs ini kepada publik di bulan Mei, 6 bulan sebelum YouTube memulai debut resminya. Sejarah berdirinya YouTube

sendiri sebenarnya berhutang besar kepada para angel investor seperti misalnya Sequoia Capital yang menginvestasikan 3,5 juta dollar US. Seiring berjalannya waktu, Reolof Botha yang merupakan partner dari Sequoia dan mantan CEO PayPal memutuskan untuk bergabung dalam deretan direktur YouTube. Video yang pertama kali diunggah di situs tersebut berjudul “Me at the zoo” yang menunjukkan Jawed Karim ketika ia sedang ada di kebun binatang San Diego. Video yang diunggah pada bulan April 2005 tersebut masih bisa ditonton hingga saat ini.

YouTube mulai memasuki babak baru pada musim panas tahun 2006 dimana YouTube masuk dalam deretan situs yang berkembang paling cepat dengan statistik pengunggahan video baru yang angkanya lebih dari 65.000 per hari, ditambah dengan penyajian 100 juta lebih video per harinya. Menurut survei, situs ini ada di peringkat 5 website terpopuler dan jauh mengalahkan MySpace dalam perkembangannya. Setiap bulan juga situs ini berhasil menjaring 20 juta pengunjung, dimana menurut Nielsen/NetRatings, 44% dari angka tersebut adalah wanita dan 56% sisanya adalah laki-laki. Di tahun yang sama juga mulai terjadi partnership yang akan mengubah jalur perkembangan YouTube, yaitu partnership di bidang marketing dan pengiklanan bersama NBC. Pada tanggal 9 Oktober 2006, sebuah berita mengejutkan muncul dari Google, sebuah perusahaan super besar di Amerika yang berkecukupan khusus di bidang penyajian jasa berbasis internet, perusahaan tersebut berniat membeli YouTube dengan harga total 1,65 miliar US dollar dalam bentuk saham. Perjanjian pembelian

yang kemudian menjadi titik balik baru dalam sejarah berdirinya YouTube ini terjadi setelah YouTube mengajukan tiga perjanjian dengan perusahaan media lainnya untuk menghindari permasalahan copyright. Bahkan setelah dibeli oleh Google, YouTube tetap berniat untuk melanjutkan kegiatan mereka secara independen, yang akhirnya disetujui oleh Google dan merupakan akuisisi Google yang terbesar kedua. Di tahun yang sama juga, YouTube mendapatkan kesempatan menjadi Person of the Year dari majalah Time, dan oleh majalah PC World YouTube dinobatkan sebagai produk terbaik nomor 9 dalam “10 Produk Terbaik Tahun 2006”.

Melejitnya situs YouTube menjadi salah satu media sosial yang populer, tentu saja hal ini menjadi perhatian khusus. Beberapa perusahaan menilai situs YouTube ini merupakan sarana yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan promosi. Banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam menampilkan iklan mereka pada situs YouTube, diantaranya adalah membuat iklan pop-up, membuat banner iklan, bahkan ada perusahaan yang membuat channel khusus perusahaan tersebut dengan harapan para pengakses situs YouTube men-subscribe channel tersebut.

Seperti yang dilansir dari halaman resmi situs YouTube yaitu <http://YouTube.com/yt/press/id/statistics.html>, pendapatan YouTube yang berasal dari periklanan mengalami peningkatan hingga 50% per tahun dan hal ini telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Situs tersebut juga menyebut bahwa sebanyak 100 merek global telah menjalankan iklan TrueView sepanjang tahun lalu, dan 95% pengiklan TrueView telah

melakukan periklanan di berbagai jenis iklan yang terdapat pada situs YouTube. YouTube juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan TrueView yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan promosi via YouTube, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menggunakan TrueView meningkat sebesar 45% pada tahun 2014. Meningkatnya jumlah iklan di media online bahkan sosial media dewasa ini membuat pengakses internet terbanjiri pesan pesan perusahaan. Pesan iklan tersebut tidak hanya muncul ketika seorang pengakses mengunjungi situs instant messaging, internet forum, media sosial, bahkan iklan tersebut muncul di situs media sosial berbagi video seperti YouTube. Sebagai konsekuensinya pengakses internet maupun pengakses sosial media bisa menjadi penyaring informasi atau bahkan menghindari iklan yang terdapat di suatu situs di internet maupun situs situs media sosial karena dinilai tidak menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengakses internet maupun pengakses sosial media. Hasil penelitian yang dilakukan Cho dan Choan (2004) menyatakan bahwa terdukungnya semua hipotesis pengaruh antara penghindaran tujuan, persepsi kekacauan iklan dan pengalaan masa lalu yang negatif berpengaruh terhadap perilaku penghindaran iklan. Penelitian ini akan menjadikan situs sosial media berbagi video YouTube sebagai objek penelitian. Hal ini didasari karena penulis menilai jumlah pengakses situs YouTube dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (tabel 1.1).

Tabel 1.1

Statistik Pengakses Situs YouTube.

Tahun	Jumlah Pengakses
2014	6.480.000 Pengakses
2015	9.480.000 Pengakses
2016	14.500.000 Pengakses

Sumber : *We are Social dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengakses situs YouTube mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambahnya jumlah pengakses situs YouTube di tahun tahun mendatang.

6. Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara terminologi demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

- b. Sidney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara bebas dari rakyat biasa.
- c. Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d. Henry B. Mayo mengatakan, demokrasi sebagai sistem politik, merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- e. Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
- f. Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut

serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan- tindakan kepada mayoritas itu.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

7. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia

biasa yang saling membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".

Ciri-ciri Media Sosial. Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya.
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

b. Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi, self-disclosure)

Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010.

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial :

1. Proyek Kolaborasi Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-remove konten – konten yang ada di website ini. Contohnya wikipedia.
2. Blog dan microblog User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter, Blogspot, Tumblr, Path dan lain-lain.
3. Konten Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten-konten media, baik seperti video, ebook, gambar dan lain-lain. Contohnya Youtube.
4. Situs jejaring sosial Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh Facebook, Path, Instagram dan lain-lain.
5. Virtual game world Dunia virtual dimana mereplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata, contohnya game online.
6. Virtual social world. Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi Universitas Sumatera Utara dengan yang lain.

Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life.

8. Media Online

Media online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, suara dan sebagai sarana komunikasi secara online (email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media social) yang bersifat publisitas dan periodisitas dengan menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature, hiburan) secara online.

Media online atau digital media merupakan alternatif media masa kini, yang bersifat cepat dan mudah diakses. Media online menjadi jawaban atas pemberitaan langsung karena keterlambatan media cetak yang tidak bisa memberikan suguhan berita secara pada hari itu juga yang tersaji secara online di internet. Perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, sehingga informasi dapat berpindah dengan sangat cepat karena munculnya media komunikasi baru yaitu internet sebagai media online.

Dengan media massa manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal. Salah satunya dengan media online yang tergolong media paling baru. Media massa online tidak pernah menghilangkan media massa lama tetapi mensubstitusinya. Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan

kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita (Septiawan Santana K, 2005:137).

Dalam jurnal komunikasi internasional *Mass Society, Mass Culture, and Mass Communication: The Meaning Of Mass*, Oleh kurt Lang dan Gladys Engel Lang (2009), menyebutkan:

The new media have also affected culture. There has been a far-reaching transformation of the general way of life, particularly in how people spend their leisure hours and how they take part in celebratory occasions. Traditional folk art and customary recreational activities have been partly replaced by an unprecedented flood of symbolic goods produced for the market or sold to media organizations for dissemination to their audiences. The viability of artistic creations today is less dependent on aristocratic or state patronage than so-called "high" culture had been in the past. Without momentous advances in communication technology, such a transformation would have been inconceivable (<http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/views/597/407>). Maksudnya

dengan adanya media baru, seperti halnya media online akan bisa merubah kebiasaan orang dalam cara hidup, menghabiskan waktu luang mereka dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi.

Septiawan santana K (2005:137) menyebutkan terdapat lima perbedaan utama media massa online dan media massa tradisional yang sekaligus menjadi karakteristik media massa online yaitu :

1. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media.

2. Kurangnya tirani penulis terhadap pembaca.
3. Tidak seorang pun dapat mengendalikan perhatian khalayak.
4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung.
5. Interaktifitas *Web*.
6. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan.

B. Landasan Teori

1. Teori Agenda Setting

Teori ini dikembangkan oleh Mc Combs dan Shaws (1972). Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Realitas yang sampai kepada masyarakat adalah realitas yang sudah di *setting* sesuai dengan agenda media. Makna objektif realitas sudah tidak ada dalam berita, yang sampai kepada khalayak bukan representasi realitas tetapi citra yang media usaha ciptakan untuk mengarahkan persepsi tentang mana isu atau aspek yang dianggap penting dan mana yang tidak. Sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat.

2. Teori Kontruksi Realitas Sosial

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh

individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Dalam konteks media massa, keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas yang akan muncul di benak khalayak. Oleh karena persoalan makna itulah, maka penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya (makna atau citra). Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya.

3. Teori Media Demokratik-Partisipan – *Democartic-participant Media Theory*

Teori media demokratik-partisipan muncul dalam masyarakat liberal sebagai respon terhadap teori pers bebas dan teori tanggung jawab sosial. Teori ini memberikan hak untuk berkomunikasi kepada seluruh warga Negara apakah itu sebagai individu atau kelompok dan mengharuskan media melayani kebutuhan khalayak.

Inti dari teori media demokratik partisipan adalah kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi penerima dalam masyarakat politik. Hal ini terkait dengan hak atas informasi yang relevan, hak untuk menjawab kembali, hak untuk menggunakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dalam kelompok masyarakat berskala kecil serta kelompok kepentingan sub budaya.

a. Prinsip-Prinsip Utama Teori Media Demokratik-Partisipan

Secara singkat, teori media demokratik-partisipan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (McQuail,1987:122):

1. Warga Negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri.
2. Organisasi dan isi media hendaknya tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi Negara.
3. Media hendaknya ada terutama untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli, atau nasabah media tersebut.

4. Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal hendaknya memiliki media sendiri.
5. Bentuk media yang berskala kecil, interaktif dan partisipatif lebih baik dibandingkan media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan.
6. Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan media massa tidak cukup hanya diungkapkan melalui tuntutan konsumen perorangan, tidak juga melalui Negara dan berbagai lembaga utamanya.
7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.

C. Penelitian yang Relevan

Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian yang relevan, antara lain:

1. Demokrasi Virtual Dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia (Iswandi Syaputra)

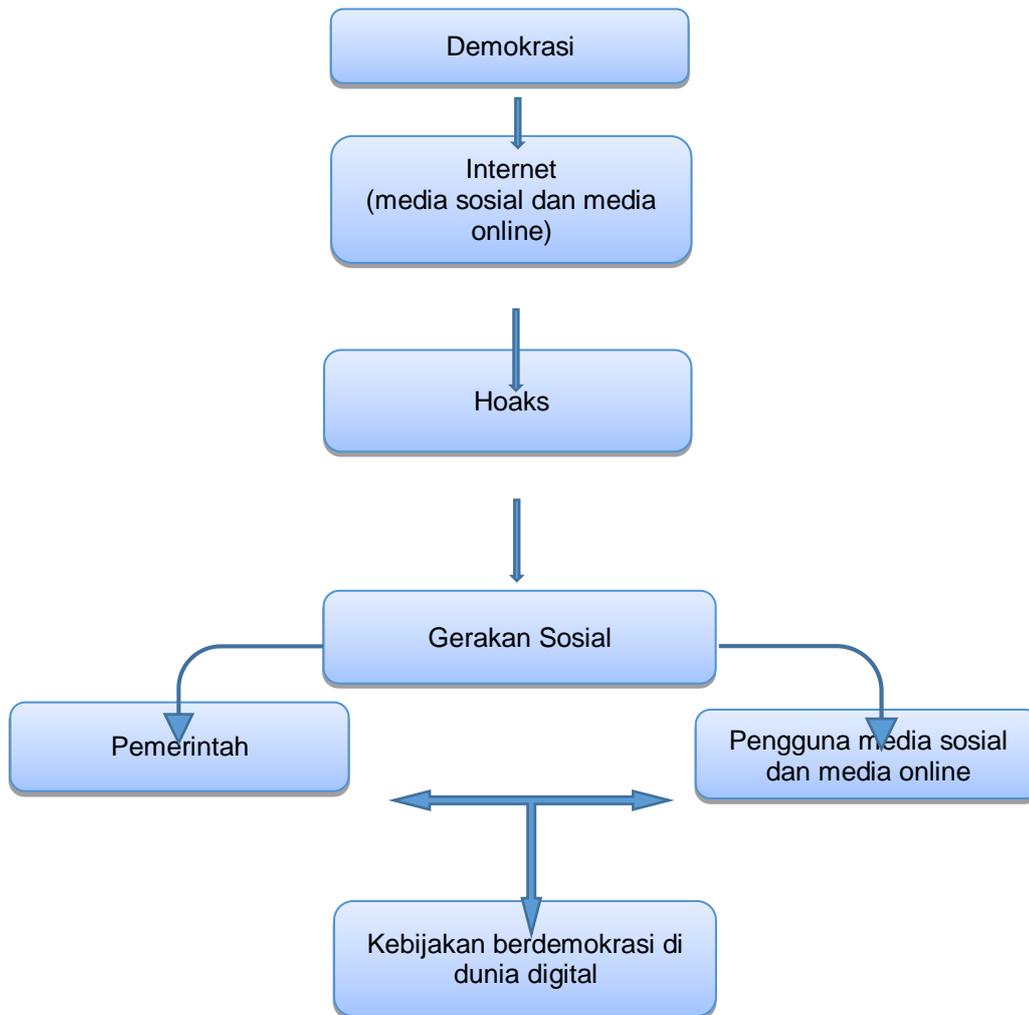
Penelitian ini berisi tentang hasil analisis hubungan antara demokrasi yang terjadi di jagad dunia maya dan perang siber (Opini publik) sebagai implikasinya.

2. Media Sosial dalam Gerakan Bali Tolak Reklamasi (I Gusti Agung Ayu Kade Galuh)

Penelitian ini tidak berbicara mengenai peran media sosial sebagai saluran komunikasi di antara aktivis. Sebaliknya, media sosial justru dipandang sebagai salah satu strategi gerakan untuk mencapai tuntutan. Dengan kata lain, penelitian ini melihat bagaimana proses demokrasi terjadi dalam level grassroots di Indonesia melalui media online. Lebih jauh, kajian ini juga menjawab bagaimana proses transformasi aktivitas media sosial menjadi gerakan nyata di Indonesia. Adapun, proses transformasi tersebut dibaca sebagai bagian dari strategi gerakan Bali Tolak Reklamasi.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang ada di atas, maka peneliti membuat kerangka konseptual seperti gambar berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang disesuaikan dengan teori AWK model Roger Fowler. Data yang dianalisis berupa video ceramah Rizieq Syihab yang diambil dari satu media massa daring Youtube. Data dikumpulkan apa adanya. Video yang diambil terbatas karena ruang analisis yang terbatas. Tulisan ini akan menggambarkan fenomena secara alamiah tanpa rekayasa, dan akan dipaparkan seobjektif mungkin. Fokus penelitian ingin menjelaskan bagaimana dan mengapa media sosial dan media online berpengaruh terhadap demokrasi. Sehingga, jawaban akan lebih mengarah pada pemaparan/penjelasan mendalam (Kualitatif interpretative) mengenai alasan dipilihnya media sosial dan media online sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi demokrasi, bagaimana penggunaan dan pengaruh media tersebut, hingga bagaimana transformasi strategi dari gerakan di media sosial hingga gerakan di dunia nyata.

Penelitian ini akan menyelidiki fenomena media sosial dan media online serta hubungannya dengan kebebasan informasi. Artinya, penelitian ini berfokus pada kasus, yaitu penggunaan media sosial sebagai penggerak roda demokrasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kota Makassar provinsi Sulawesi selatan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan dokumen tertulis terkait dengan judul dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Disini observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak, dengan cara melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya.

b. Dokumenter/dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun video. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun

elektronik. Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam menelusuri data historis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Analisis wacana Kritis (AWK). Analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi lebih dalam lagi dibalik bahasa sudah ada ideologi, bahwa bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan bahkan bisa menjadi alat penindasan melalui bahasa. Maka analisis wacana kritis disini ingin mencoba menganalisa secara kritis penggunaan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Analisis wacana kritis mencoba untuk melihat lebih dalam terkait isu-isu yang terjadi karena dinamika di masyarakat hari ini penuh dengan hal yang tidak transparan didalam era informasi, disitu ada manipulasi dan rekayasa sehingga harus diangkat dan dianalisis secara kritis. Dan juga kenyataannya dalam bahasa ada macam-macam deskripsi, yaitu ada fiksi dan ada macam-macam versi sehingga menjadi sangat penting untuk di analisis secara mendalam dan kritis. Fungsi dari analisis wacana kritis sendiri adalah mengungkap apa yang ada dibalik bahasa sehingga dapat mencairkan kembali ideologi yang sudah beku agar bentuk-bentuk dominasi yang tidak adil, bentuk-bentuk ketidakberesan sosial itu bisa diungkap ke permukaan. Bentuk ketidakberesan sosial itu bisa dalam bentuk ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, bentuk-bentuk penindasan dan juga prasangka-prasangka

negatif. Diharapkan melalui analisis wacana kritis ini semua bisa menjadi lebih jelas dan lebih transparan.

F. Pengecekan Validitas Temuan atau Kesimpulan

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal; **pertama**, subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif. **Kedua**, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol. **Ketiga**, sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan memengaruhi hasil akurasi penelitian.

Salah satu cara paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. Menurut Denzin (Burhan:2011) menjelaskan bahwa teknik ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori.

1. **Triangulasi Kejujuran Peneliti**, digunakan untuk mengukur kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan, dengan cara meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan.
2. **Triangulasi dengan Sumber Data**, dilakukan dengan mengecek baik derajat informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda

dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan lima cara, yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
3. **Triangulasi dengan Metode**, menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data serta pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
4. **Triangulasi dengan Teori**, Lincoln menjelaskan fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori (Burhan, 2011). Namun hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarah pada upaya penemuan penelitian lainnya. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data lain dengan maksud membandingkannya. Apabila peneliti gagal menemukan informasi yang cukup kuat untuk

menjelaskan kembali informasi yang telah diperoleh, justru peneliti telah mendapat bukti bahwa derajat kepercayaan hasil penelitian peneliti sudah tinggi.

G. Tahap-tahap penelitian dan jadwalnya (waktu penelitian)

Penyelesaian tesis membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan yang dimulai dari proses pengusulan judul sampai pada ujian tutup, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Time Schedule

No	Kegiatan	Bulan									Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pengusulan Judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Penelitian										
5	Pengolahan Data										
6	Bimbingan Tesis										
7	Ujian Hasil										
8	Perbaikan Tesis										
9	Ujian Akhir										

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Habib Rizieq Syihab

Habib rizieq syihab adalah seorang tokoh ulama, ia menjabat sebagai imam besar Front Pembela Islam (FPI). Pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 ini adalah anak Husein Shihab dan Sidah Alatas. Menginjak umur 11 tahun, ayahnya wafat. Sejak itu, Rizieq di asuh oleh ibunya sendiri. Meski ditinggalkan ayahnya, Rizieq tetap mendapatkan bimbingan sang ibu dan ustadz di mesjid tempat ia mengaji. Tak heran, meski tidak masuk pesantren, pemahaman Rizieq soal agama sangat menonjol dibanding teman-temannya saat itu.

1. Riwayat Pendidikan

Pendidikan sekolahnya dimulai di SDN 1 Petamburan, SMP 40 Pejompongan, SMP Kristen Bethel Petamburan jakarta, SMA 4 Gambir, dan SMA Islamic Vilage Tangerang sampai pada tahun 1982. Kemudian tahun 1983 kuliah di LIPIA selama setahun dan kemudian mendapatkan beasiswa dari OKI untuk melanjutkan study S1 di King Saud University jurusan Dirasah Islamiyah, Fakultas Tarbiyah. Tahun 1990 Habib Rizieq berhasil menyelesaikan studinya dan sempat mengajar di SLA di Riyadh selama 1 tahun lalu kembali ke Indonesia pada tahun 1992. Ia juga sempat melanjutkan study program Magister (S2) di Universitas Islam Internasional

Antar Bangsa di Malaysia dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk melanjutkan dakwahnya.

2. Karier

Selain mengisi pengajian-pengajian, Habib Rizieq juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Jami'at Khair sampai tahun 1996. Walaupun sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah ia tetap mengajar disekolah tersebut sebagai guru bidang fiqih atau ushul fiqh. Pengalaman organisasinya dimulai dari menjadi anggota Jami'at Khair, Ormas berbasis keturunan Arab dan Habib, ia juga pernah menjabat sebagai dewan syariat BPRS At-Taqwa Tangerang. Sebelum menjadi ketua FPI, ia pernah menjadi pembina sejumlah Majelis Ta'lim se-Jabodetabek. Dan sejak berdirinya FPI tahun 1998 sampai 2002 menjabat sebagai ketua umum FPI, kemudian dari 2003 sampai sekarang menjabat sebagai ketua majelis Tanfidzi FPI. Habib Rizieq Shihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai Sayap Juang, FPI juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter yang dianggap kontroversial karena melakukan aksi penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa bulan Ramadhan.

Pada tanggal 30 Oktober 2008, Habib Rizieq divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP.

B. Roger Fowler

Roger Fowler merupakan salah seorang dari kelompok aliran Linguistik Eropa Kontinental. Kehadiran mereka ditandai dengan munculnya buku *Language and Central* (1979). Pendekatan yang mereka lakukan kemudian dikenal sebagai *critical Linguistics*. *Critical Linguistics* dikembangkan dari teori linguistik sekelompok peneliti yang melihat bagaimana tata bahasa (grammar) tertentu menjadikan kata tertentu (diksi) membawa implikasi dan ideologi tertentu (Darma, 2009 :89). Istilah wacana dioposisikan dengan "ideologi". Ini banyak dilakukan oleh para linguis kritis.

Secara tegas **Roger Fowler** mengemukakannya sebagai berikut :

Discourse is speech or writing seen from the point of view of the beliefs, values and categories which it embodies; these beliefs etc. constitute a way of looking at the world, an organization or representation of experience— "ideology" in the neutral non-pejorative sense. Different modes of discourse encode different representations of experience; and the source of these representations is the communicative contextm within which the discourse is embedded (Mills, 1997:6).

Point pentingnya adalah sebagai berikut :

1. Wacana merupakan bahasa verbal, speech. Wacana juga dapat berupa teks tulisan yang dibentuk dari nilai, kepercayaan dan hal-hal lain yang membentuknya.
2. Sebagai cara pandang melihat dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman "ideologi" dalam pandangan netral dan tidak menyinggung.
3. Mode yang berbeda dari wacana menyandikan perbedaan representasi dari pengalaman. Sumber dari representasi ini adalah konteks komunikasi dalam wacana dimana dia dibentuk.

Fowler yang menekankan pada konsep "titik pandang" terhadap berbagai hal. Seperti titik pandang pada ideologi, politik sosial dan kultural. Karena para linguis kritis percaya bahwa pilihan bahasa dibuat menurut seperangkat kendala diatas.

Yang menjadi fokus penelitian ini dengan menggunakan model Fowler dkk. yaitu pada praktik pemakaian bahasa yang dipakai. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pada level kata. Bagaimana peristiwa dan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut hendak dibahasakan. Kata-kata disini bukan hanya penanda atau identitas tetapi dihubungkan dengan ideologi tertentu, makna apa yang ingin dikomunikasikan kepada khalayak. Pihak atau kelompok mana yang diuntungkan dengan pemakaian kata-kata tersebut, dan pihak mana yang dirugikan dan posisinya termarjinalkan.

Kedua, pada level susunan kata, atau kalimat. Bagaimana kata-kata disusun ke dalam bentuk kalimat tertentu dimengerti dan dipahami, bukan semata sebagai persoalan teknis kebahasaan, tetapi praktik bahasa. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana pola pengaturan, penggabungan, penyusunan tersebut menimbulkan efek tertentu. Membuat posisi satu pihak lebih menguntungkan atau mempunyai citra positif dibandingkan dengan pihak lain. Atau peristiwa tertentu dipahami dalam kategori tertentu yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kategori pemahaman lain.

Dalam model ini, Roger dkk. ingin menggambarkan pesan atau informasi dalam rangkaian bagaimana ia ditampilkan dalam bahasa. Dan bagaimana bahasa yang dipakai tersebut membawa konsekuensi tertentu ketika diterima oleh khalayak. Serta memperhatikan konteks sejarah teks. Bahasa dipahami sebagai perangkat sistem abstrak menuju interaksi antara bahasa dan konteks. Dari perspektif kesejarahan tersebut, setiap bahasa, kosakata-kalimat, tata bahasa tertentu dipahami dan dikritisi kehadirannya yang disesuaikan dengan konteks di mana pesan itu hadir.

C. Sejarah PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30

September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) atau (Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda. Pada Oktober 1914 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "*Het Vrije Woord*" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars. Dan pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, yaitu "*Soeara Merdeka*". Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang.

Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, *Soeara Ra'jat*. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaoen diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis

Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Lalu pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

1. Pemberontakan 1926

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim keBoven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari

pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Muso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Muso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpunan Indonesia, yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.

2. Peristiwa Madiun 1948

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda anti-pemerintah, mengadakan demonstrasi-

demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

3. Bangkitnya PKI

Setelah terpuruk akibat peristiwa di Madiun, PKI seakan telah menghilang, namun pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu *Harian Rakjat* dan *Bintang Merah*. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959.

Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.

Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis

asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi pemicu.

Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya.

Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal.

PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya".

4. GESTAPU/G30S

Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d'état terhadap Presiden Sukarno". Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut "kapitalis birokrat", terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan "Aksi Sepihak" dan istilah "7 setan desa", serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada "kepemimpinan"-nya dan mengabaikan "demokrasi"-nya, adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI, sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi. Anggapan bahwa partai ini berdominasi, pada akhirnya tidak lebih dari satu ilusi. Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit

dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan Suyatno di kompleks perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol. Untung Samsuri. Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya. Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa. Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat

Cina), Hsinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI. Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa itu secara fakta. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia. Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965

dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan. Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke

waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh PKI kini disebut dengan peristiwa G30S/PKI. Dimana peristiwa tersebut telah cukup menggambarkan penculikan dan pembunuhan terencana yang dipublikasikan dilakukan oleh PKI terhadap sejumlah jenderal TNI AD yang kemudian di buang ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dan gagalnya upaya PKI untuk menggulingkan Ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia untuk kemudian di ganti dengan Ideologi Komunis, pada masa pemerintahan presiden Soeharto telah dikenal dengan peringatan hari kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober oleh seluruh rakyat indonesia dengan mengkibarkan bendera setengah tiang. Namun hingga kini berbagai pertanyaan tentang siapa perencana gerakan 30 September masih berkumandang.

D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai penggunaan teori Roger Fowler, dkk. Terkait wacana atau pernyataan Habib Rizieq Syihab di media online Youtube.com. Data yang sudah didapat kemudian diklasifikasikan. Data dalam penelitian ini berupa wacana terkait pernyataan Habib Rizieq Syihab. Selain itu, penggunaan teori Roger Fowler, dkk. Dibagi menjadi dua yaitu, aspek kosakata dan tata bahasa. Aspek kosakata dibagi menjadi empat meliputi kosakata: membuat klasifikasi, kosakata: membatasi pandangan, kosakata: pertarungan wacana, kosakata: marginalisasi. Selanjutnya, aspek tata bahasa dibagi menjadi dua yaitu efek bentuk kalimat pasif: penghilangan pelaku dan efek nominalisasi: penghilangan pelaku.

Tulisan berikut akan menganalisis video ceramah dengan judul “Habib Rizieq kami tidak ridho uang ada lambang palu arit TAP MPR masih berlaku” yang diunduh dari laman Youtube.com. Dalam video berdurasi 22 menit 40 detik ini, imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab atau Habib Rizieq menyebut ada lambang palu arit dalam pecahan uang rupiah baru, Rizieq menjelaskan ada kemiripan antara lambang BI dan lambang palu arit (PKI) dalam ceramahnya di depan para jamaah yang hadir seraya menunjukkan lembaran pecahan seratus ribuan yang lama dan seluruh pecahan uang kertas yang baru. Berikut isi ceramahnya:

Video (26 Desember 2016)

Judul Video:

“HABIB RIZIEQ KAMI TIDAK RIDHO UANG ADA LAMBANG PALU ARIT
TAP MPR MASIH BERLAKU”

“Ini duit baru. Ada dua ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, semuanya ada palu arit. Lihat cetakannya. Ini palu arit bolak-balik palu arit juga, yang ini tulisannya BI, yang ini palu arit (menunjuk pecahan uang seratus ribuan yang lama dan merujuk pada seluruh pecahan uang kertas yang baru). Disini palu arit, di depannya juga. Palu arit lambang apa? PKI (dijawab oleh jemaah yang hadir). Ini duit baru. Ada 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Lagi-lagi palu arit. Lihat cetakannya. Ini palu arit. Bolak-balik palu arit juga. Alesannya BI. Iya kalau kita lihat dibawah matahari, memang BI. Tapi kalau tidak ada matahari, yang keluar palu arit. Jadi bagian palu arit dikasih merah supaya kelihatan. Yang tidak palu arit disamarkan. Sejak kapan uang negara palu arit. Ini bukan fitnah, ini fakta. Kita sudah protes, kenapa uang lama 100 ribu yang ada kuningnya ada palu arit, yang tidak ada kuningnya tidak palu arit. Kita protes. Sekarang diganti dengan uang baru. Kita pikir dibenerin, enggak diperbaiki malah nambah sudah. Semuanya pakai palu arit. Yang 2 ribu, 10 ribu, 50 ribu, pakai palu arit. Yang seribu pakai palu arit. Ini negara pancasila atau PKI? Ada yang mengatakan ini soal duit saja, bukan, ini soal lambang. Kita ini mayoritas umat Islam, umat beragama. Negara kita dasarnya pancasila. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Dan ada Tap MPRS no 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Dan

pelarangan ajaran PKI serta pelarangan ajaran PKI serta pelarangan atribut PKI. Itu dilarang oleh konstitusi. Lah sekarang palu arit ada di uang negara. Ini konstitusi kita bagaimana. Jangan sampai nanti presiden bilang, yang cetak bukan saya. Ya memang bukan presiden, ya panggil gubernur BI nya, panggil dulu percetakannya, palu arit lagi yang keluar. Enggak bisa. Kan presiden yang mengumumkan ada uang baru, presiden harus bertanggung jawab atau dia buta, enggak lihat ada palu arit lagi, palu arit lagi. Atau memang presidennya yang PKI. Jangan salahkan kita kalau kita mengatakan begitu. Jangan nanti dikatakan Habib Rizieq memfitnah, Habib Rizieq memprofokasi, Habib Rizieq ingin menjatuhkan presiden. Kami bukan ingin menjatuhkan presiden, kami minta pertanggung jawaban. Ini NKRI, berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan bhineka tunggal ika, tidak mengizinkan PKI hidup kembali di negeri ini, saudara-saudara. Kalau presiden membiarkan ini berarti presiden melanggar konstitusi. DPR tidak boleh diam. Gunakan hak-hak konstitusi di DPR, saudara-saudara. Lakukan hak interpelasi, bertanya secara tertulis kepada presiden kenapa begini. Lihat jawaban presiden, kalau enggak dijawab, gunakan hak angket. Kalau presiden enggak mau jawab, gunakan hak impeach, saudara. Minta pertanggung jawabannya di sidang istimewa MPR RI, saudara. Kalau enggak bisa bertanggung jawab, berhentikan secara konstitusional, bukan dibiarkan saudara-saudara. Jadi kita dalam kantong ini (sambil memasukkan uang ke kantong) buat PKI semua ini. Saya mau tanya, ridho

apa enggak? Rela apa enggak? Biarkan atau lawan? Takbir!!!. Shollu alan nabi.

Jadi ini perlu kita tahu saudara. Kita sudah lapor. Ini pak kapolri, lihat. Saya tunjukkan. Saya ketemu langsung. Tolong ya pak, dilihat. Kalau bapak kurang jelas, silahkan pakai lampu sorot, ini logo PKI. Dan beliau terima baik. Baik nanti kita coba tindak lanjuti, habib (kata kapolri. Oke kita tunggu.”

1. Aspek Kosakata

a. Kosakata: Membuat Klasifikasi

Pada video diatas, terdapat kosakata “**palu arit**” yang termasuk membuat klasifikasi. Kata “**palu arit**” merepresentasikan PKI (sebuah organisasi yang dilarang hidup dan tumbuh di Indonesia sejak 1965). Kata “**palu arit**” menjadi bermakna negatif terhadap objek dalam video ceramah tersebut dalam hal ini objek itu adalah rezim pemerintah. Kata “**palu arit**” seolah-olah sengaja dikonstruksikan untuk memberitahu kepada khalayak masyarakat bahwa rezim hari ini adalah rezim yang dekat bahkan ekstremnya lagi rezim yang berpahaman partai terlarang PKI, dengan dipilihnya Rectoverso mata uang baru oleh BI yang dianggap mirip lambang PKI. Penggunaan kosakata “**palu arit**” digunakan untuk menggiring khalayak masyarakat ke arah pemikiran tertentu dengan memanfaatkan kosakata klasifikasi tertentu yang maknanya mendekati pemikiran si pembuat wacana. Kosakata tertentu mampu menggiring khalayak untuk membuat klasifikasi tertentu pula dari suatu realitas. Oleh karena itu, dapat

dilihat bahwa suatu realitas dapat dikonstruksikan dengan menggunakan golongan kata-kata tertentu yang maknanya mendekati hal yang diinginkan si pembuat wacana itu sendiri.

b. Kosakata: Membatasi Pandangan

Pemakaian kosakata membatasi pandangan juga digunakan dalam video ini. Kosakata: membatasi pandangan pada video ini yaitu “*Jadi bagian palu arit dikasih merah supaya **kelihatan**. Yang tidak palu arit **disamarkan**”*. Penggunaan kosakata “kelihatan dan disamarkan” dipilih oleh si pembuat wacana dengan tujuan untuk menggambarkan dan membentuk pemikiran khalayak bahwa pihak BI dalam hal ini dengan sengaja merekayasa model *rectoverso* yang dipilih. Seperti yang diketahui bahwa model *rectoverso* ini dipilih dengan maksud sebagai sebuah sistem keamanan uang agar tidak mudah dipalsukan. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki khalayak, si pembuat wacana memiliki kemampuan untuk merekonstruksikan kembali realitas yang terjadi dengan penggunaan kata-katanya. Hal ini menjadi mudah karena khalayak tidak memahami atau mengikuti peristiwa secara langsung (Eriyanto, 2001:137).

c. Kosakata: Pertarungan Wacana

*“Lihat cetakannya. Ini palu arit. Bolak-balik palu arit juga. Alesannya BI. Iya kalau kita lihat **dibawah matahari**, memang BI. Tapi kalau **tidak ada matahari**, yang keluar palu arit”*.

Pada wacana diatas terdapat kosakata “dibawah matahari” dan “tidak ada matahari” yang termasuk pertarungan wacana. Wacana diatas

menjelaskan bahwa pecahan uang baru apabila diterawang dibawah matahari menurut si pembuat wacana memang berlogo BI namun ketika diterawang pada saat tidak ada matahari maka yang muncul adalah lambang palu arit. Masing-masing pihak memiliki versi yang berbeda dalam memenangkan opini. Yakni pihak Habib Rizieq menganggap bahwa pecahan uang baru berlogo palu arit sedangkan pihak BI menjelaskan bahwa itu adalah salah satu bentuk rectoverso yang berfungsi sebagai pengaman uang dari uang palsu. Dalam hal ini masing-masing pihak ingin memenangkan opininya masing-masing.

d. Kosakata: Marjinalisasi

“Jangan sampai nanti presiden bilang, yang cetak bukan saya. Ya memang bukan presiden, ya panggil gubernur BI nya, panggil dulu percetakannya, palu arit lagi yang keluar. Enggak bisa. Kan presiden yang mengumumkan ada uang baru, presiden harus bertanggung jawab atau dia buta, enggak lihat ada palu arit lagi, palu arit lagi. Atau memang presidennya yang PKI”.

Contoh kosakata: Marjinalisasi dalam video diatas adalah “Atau memang presidennya yang **PKI**”. Dalam hal ini, kosakata “PKI” mengandung makna berpahaman PKI atau berafiliasi pada PKI yang sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa PKI dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dengan begitu, dikatakannya kata “PKI” secara langsung akan menimbulkan konotasi (makna negatif) bagi objek yaitu dalam hal ini presiden RI. Dengan begitu dapat dilihat bahwa kata “PKI” dikonstruksikan

oleh si pembuat wacana untuk membentuk pendapat umum bahwa Presiden RI dekat bahkan berpahaman PKI dalam memimpin Negara.

2. Aspek Tata Bahasa

a. Efek bentuk kalimat pasif: Penghilangan Pelaku

*“ya panggil gubernur Bl nya, panggil dulu percetakannya, palu arit lagi yang keluar. Enggak bisa. Kan presiden yang mengumumkan ada uang baru, presiden harus **bertanggung jawab** atau dia buta, enggak lihat ada palu arit lagi, palu arit lagi”.*

Pada wacana diatas, terdapat kosakata “bertanggung jawab” yang termasuk efek bentuk kalimat pasif: penghilangan pelaku. Wacana diatas secara tidak langsung menjelaskan atau mengarahkan fokus pada pertanggung jawaban Presiden sebagai kepala negara yang mengumumkan mata uang baru. Presiden sebagai kepala negara dirasa punya andil yang sangat besar oleh si pembuat wacana dalam proses pemilihan Rectoverso mata uang. Penafsiran pada kutipan wacana diatas dilakukan dengan tujuan menekankan sasaran pelaku atau tindakan. Hal ini karena dalam kalimat aktif yang ditekankan adalah subjek pelaku dari suatu kegiatan. Sedangkan dalam kalimat pasif yang ditekankan adalah sasaran dari suatu pelaku atau tindakan tersebut (Eriyanto, 2001).

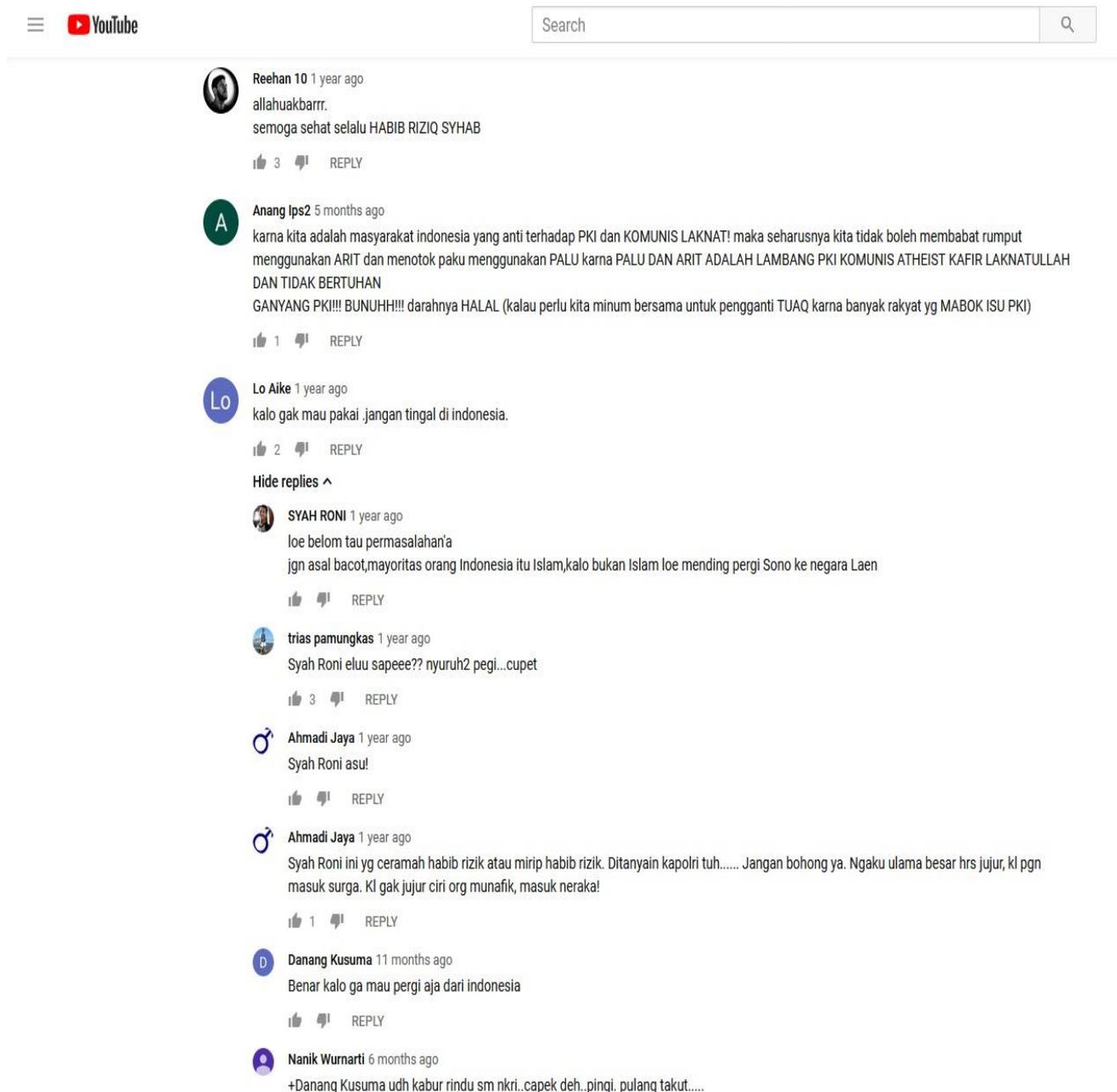
b. Efek nominalisasi: Penghilangan Pelaku

“Negara kita dasarnya pancasila. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Dan ada Tap MPRS no 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI.

*Dan pelarangan ajaran PKI serta pelarangan atribut PKI. Itu dilarang oleh konstitusi. **Lah sekarang palu arit ada di uang negara***”.

Pada wacana diatas terdapat kalimat “lah sekarang palu arit ada di uang negara” yang termasuk efek nominalisasi:penghilangan pelaku. Wacana diatas menjelaskan bahwa lambang palu arit yang yang telah ada di uang negara hari ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap dasar negara yaitu pancasila dan TAP MPRS no 25 tahun 1966. Dalam hal ini si pembuat wacana menggunakan bentuk ini dengan tujuan menyembunyikan subjek dan objek dalam wacana tersebut. Bentuk ini sekaligus mengarahkan titik perhatian khalayak masyarakat pada peristiwa itu sendiri. Bentuk nominalisasi dapat menghilangkan subjek bahkan objek karena dalam bentuk nominal tidak lagi kegiatan atau tindakan tetapi yang ditekankan disini adalah suatu peristiwa.

c. Pada video diatas, juga terdapat beberapa komentar dari Netizen (viewer) dari media online youtube.com. diantaranya adalah sebagai berikut:



The image shows a screenshot of a YouTube video's comment section. At the top left, there is a menu icon and the YouTube logo. A search bar is located at the top right. The comments are listed vertically, each with a user profile picture, name, and timestamp. The first comment is from 'Reehan' (1 year ago) with the text 'allahuakbarr. semoga sehat selalu HABIB RIZIQ SYHAB' and 3 likes. The second is from 'Anang Ips2' (5 months ago) with a long, inflammatory comment about PKI and Komunis, and 1 like. The third is from 'Lo Aike' (1 year ago) with the text 'kalo gak mau pakai ,jangan tingal di indonesia.' and 2 likes. Below this, there is a 'Hide replies' button. The next comment is from 'SYAH RONI' (1 year ago) with the text 'loe belum tau permasalahan'a jgn asal bacot,mayoritas orang Indonesia itu Islam,kalo bukan Islam loe mending pergi Sono ke negara Laen' and 1 like. This is followed by a comment from 'trias pamungkas' (1 year ago) with the text 'Syah Roni eluu sapeee?? nyuruh2 pegi...cupet' and 3 likes. Then, 'Ahmadi Jaya' (1 year ago) comments 'Syah Roni asu!' with 1 like. Another 'Ahmadi Jaya' (1 year ago) comment reads 'Syah Roni ini yg ceramah habib rizik atau mirip habib rizik. Ditanycin kapolri tuh..... Jangan bohong ya. Ngaku ulama besar hrs jujur, kl pgn masuk surga. Kl gak jujur ciri org munafik, masuk neraka!' with 1 like. Next is 'Danang Kusuma' (11 months ago) with the text 'Benar kalo ga mau pergi aja dari indonesia' and 1 like. The final comment is from 'Nanik Wurnarti' (6 months ago) with the text '+Danang Kusuma udh kabur rindu sm nkri..capek deh..pingi. pulang takut.....' and 0 likes.

Reehan 10 1 year ago
allahuakbarr.
semoga sehat selalu HABIB RIZIQ SYHAB
3 REPLY

Anang Ips2 5 months ago
karna kita adalah masyarakat indonesia yang anti terhadap PKI dan KOMUNIS LAKNAT! maka seharusnya kita tidak boleh membatat rumput menggunakan ARIT dan menotok paku menggunakan PALU karna PALU DAN ARIT ADALAH LAMBANG PKI KOMUNIS ATHEIST KAFIR LAKNATULLAH DAN TIDAK BERTUHAN
GANYANG PKI!!! BUNUHH!!! darahnya HALAL (kalau perlu kita minum bersama untuk pengganti TUAQ karna banyak rakyat yg MABOK ISU PKI)
1 REPLY

Lo Aike 1 year ago
kalo gak mau pakai ,jangan tingal di indonesia.
2 REPLY

Hide replies ^

SYAH RONI 1 year ago
loe belum tau permasalahan'a
jgn asal bacot,mayoritas orang Indonesia itu Islam,kalo bukan Islam loe mending pergi Sono ke negara Laen
1 REPLY

trias pamungkas 1 year ago
Syah Roni eluu sapeee?? nyuruh2 pegi...cupet
3 REPLY

Ahmadi Jaya 1 year ago
Syah Roni asu!
1 REPLY

Ahmadi Jaya 1 year ago
Syah Roni ini yg ceramah habib rizik atau mirip habib rizik. Ditanycin kapolri tuh..... Jangan bohong ya. Ngaku ulama besar hrs jujur, kl pgn masuk surga. Kl gak jujur ciri org munafik, masuk neraka!
1 REPLY

Danang Kusuma 11 months ago
Benar kalo ga mau pergi aja dari indonesia
1 REPLY

Nanik Wurnarti 6 months ago
+Danang Kusuma udh kabur rindu sm nkri..capek deh..pingi. pulang takut.....

D. Hoaks atau Kebebasan Informasi ?

Analisis Wacana Kritis merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji makna. Pada dasarnya wacana adalah usaha untuk mengungkapkan makna dibalik suatu pesan. Model analisis Roger Fowler dkk. memandang bahasa yang dipakai bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mempunyai aspek atau nilai ideologis tertentu. Permasalahan pentingnya adalah bagaimana realita itu dibahasakan. Realitas itu bisa berarti bagaimana peristiwa dan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa itu direpresentasikan dalam penyampaian pesan melalui bahasa yang digunakan. Bahasa sebagai representasi dari realitas tersebut bisa jadi berubah dan berbeda sama sekali dibandingkan dengan realitas yang sesungguhnya.

Jadi berdasar pada penjelasan teori Roger Fowler di atas pernyataan Habib Riziek Syihab tentang lambang Palu Arit pada pecahan mata uang baru di media online youtube adalah salah satu bentuk informasi bohong (Hoaks) karena pesan yang disampaikan dengan cara mengobok-obok emosi masyarakat (Post-truth) dengan menggunakan isu PKI untuk membentuk opini sama sekali berbeda dengan realitas yang sesungguhnya, sebagaimana yang diketahui bahwa logo yang berada pada pecahan mata uang baru adalah salah satu bentuk *recto-verso* atau pengamanan uang dan pernyataan itu juga hanya sebatas interpretasi secara pribadi oleh Habib Riziek Syihab yang tidak terbukti kebenarannya.

E. Matriks Respon Pemerintah terhadap pernyataan Habib Rizieq Syihab di Media Online terkait (Mata Uang Berlogo Palu Arit)

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
1.	Sri Mulyani	Menteri Keuangan (MENKEU)	"Nanti kita dengan BI koordinasikan saja".
2.	Agus Martowardojo	Gubernur Bank Indonesia (BI)	<p>Agus martowardojo menegaskan bahwa tidak ada simbol yang identik dengan partai komunis Indonesia (PKI) pada segala jenis uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.</p> <p>"Gambar yang dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit merupakan logo Bank Indonesia yang dipotong secara diagonal, sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan. Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (<i>rectoverso</i>), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah,"</p> <p>"Di Indonesia, <i>rectoverso</i> telah digunakan sebagai unsur pengaman Rupiah sejak tahun 1990-an. Sementara logo BI telah digunakan sebagai <i>rectoverso</i> uang Rupiah sejak tahun 2000".</p> <p>Menurut Agus unsur pengaman dalam uang rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan. Selain itu gambar <i>rectoverso</i> juga dicetak dengan teknik khusus sehingga terpecah menjadi dua bagian di sisi depan dan belakang lembar uang. Hal</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>itu hanya dapat dilihat utuh bila diterawang.</p> <p><i>Rectoverso</i> umum digunakan sebagai salah satu unsur pengaman berbagai mata uang dunia. Mengingat <i>rectoverso</i> sulit dibuat dan memerlukan alat cetak khusus. Di Indonesia, <i>rectoverso</i> telah digunakan sebagai unsur pengaman Rupiah sejak tahun 1990-an. Sementara logo BI telah digunakan sebagai <i>rectoverso</i> uang Rupiah sejak tahun 2000.</p> <p>"Rupiah merupakan salah satu lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, uang rupiah ditandatangani bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar senantiasa menghormati dan memperlakukan uang rupiah dengan baik,"</p>
3.	Joni Marsius	Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) BI Tegal, (Jawa Tengah).	<p>"Kami (BI) tekankan, beredarnya informasi tentang uang kertas pecahan Rp 100 ribu keluaran tahun 2014 di medsos itu tidak benar, apalagi dikatakan ada logo gambar palu dan arit". Ia menjelaskan, setiap uang kertas rupiah yang masih berlaku mulai pecahan Rp 1.000 sampai Rp 100.000 itu, terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai <i>rectoverso</i> atau gambar saling isi. Adapun <i>rectoverso</i> pada uang kertas rupiah dapat</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>dilihat pada bagian depan uang di sudut kiri atas di bawah angka nominal. Selain itu, juga dapat dilihat pada bagian belakang uang di sudut kanan atas di bawah nomor seri.</p> <p>“<i>Rectoverso</i> adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas di mana pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar tidak beraturan.”</p> <p>Namun demikian, apabila <i>rectoverso</i> pada uang kertas diterawang ke arah cahaya maka akan terbentuk suatu gambar yg beraturan.</p> <p>"Pada setiap pecahan uang kertas rupiah, <i>rectoverso</i>nya membentuk ornamen lambang 'BI' (singkatan dari Bank Indonesia)".</p> <p>Hingga kini <i>Rectoverso</i> adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan. Selain digunakan pada uang kertas rupiah, unsur pengaman <i>Rectoverso</i> juga digunakan oleh banyak negara. Yaitu, uang kertas ringgit Malaysia (membentuk ornamen bunga) dan uang kertas euro (membentuk ornamen nilai nominal).</p> <p>"Makanya kami kembali menegaskan <i>rectoverso</i> pada bagian belakang uang kertas rupiah tahun 2014 adalah tidak</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>benar merupakan ornamen atau lambang 'palu dan arit',"</p> <p>Untuk itu, ia berharap, masyarakat jangan pernah khawatir dan merasa curiga dengan keabsahan uang rupiah.</p> <p>"Kami minta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi di medsos yang belum terkonfirmasi. Jadi jangan khawatir dengan uang rupiah kita".</p>
4.	Dwi Suslamanto	Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) BI Kalbar	<p>la menegaskan tidak benar di bagian belakang uang cetakan 2014, merupakan ornamen palu dan arit. la menegaskan pada setiap uang kertas Rupiah yang masih berlaku, mulai dari pecahan Rp 1.000 sampai dengan Rp 100.000 terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai Rectoverso atau gambar saling isi.</p> <p>Rectoverso pada uang kertas rupiah kata Dwi dapat dilihat pada bagian depan uang di sudut kanan atas di bawah angka nominal dan pada bagian belakang uang di sudut kiri atas di bawah nomor seri.</p> <p>Rectoverso sendiri adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar (seperti) tidak beraturan.</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>Namun demikian kata Dwi apabila rectoverso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya maka akan terbentuk suatu gambar yang beraturan.</p> <p>Dalam hal uang kertas rupiah, rectoversonya membentuk ornamen lambang "BI" yang merupakan singkatan dari Bank Indonesia.</p> <p>"Sejauh ini rectoverso adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan, selain digunakan pada uang kertas Rupiah, unsur pengaman Rectoverso ini juga digunakan oleh banyak negara,"</p> <p>Rectoverso digunakan juga negara lain seperti pada uang kertas Malaysia yaitu Ringgit yang membentuk ornamen bunga dan uang kertas Euro yang membentuk ornamen nilai nominal.</p> <p>"Jadi Rectoverso pada bagian belakang uang kertas Rupiah tahun 2014 adalah tidak benar merupakan ornamen atau lambang "Palu & Arit".</p>
5.	Arif Budimanta	Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	<p>"Silakan saja dia melapor (Habib Rizieq). Itu hak dia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya interpretasi atas logo di rupiah," pemerintah dan BI sudah menjelaskan mengenai logo tersebut pada mata uang rupiah, bukanlah gambar palu dan arit.</p> <p>"Lagian tidak ada keinginan sama sekali BI dan pemerintah</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>mencantumkan palu arit di mata uang NKRI. Pencetakan atau penerbitan rupiah kan pasti sudah melalui proses yang panjang," tegas Arif.</p> <p>Dia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana atau iklim yang kondusif supaya perekonomian Indonesia lebih tinggi dan merata.</p> <p>"Ciptakanlah suasana yang damai dan tenang agar mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, kesenjangan berkurang, dan ada pemerataan".</p>
6.	Prasetio	Direktur Utama Perum Peruri	<p>"BI yang dalam posisi untuk menerangkan itu". Dia mengatakan, untuk proses pencetakan termasuk desain, Perum Peruri terus melakukan komunikasi dengan BI. Namun, dia bilang yang bisa merilis rupiah hanya BI.</p> <p>"(Desain) pasti didiskusikan, karena fungsi tugas utama mengeluarkan uang itu BI, otoritasnya ada di BI. Tapi bisnis proses melibatkan proses diskusi, koreksi, antara pencetak dan otoritas kan ada komunikasi Kalau desain segala macam yang punya kompetensi menyetujui menjelaskan ke publik BI," jelas dia.</p> <p>Dia menegaskan, rectoverso sendiri sebenarnya berperan sebagai pengaman. Maka itu, dia</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>berharap jika rectoverso tak diartikan macam-macam.</p> <p>"Itu semata-mata security saja jangan dipersepsikan yang lain. Kita pokoknya menjunjung tinggi security. Yang tentunya adanya miliknya harus dikonsultasikan dan disetujui BI,"</p>
7.			<p>Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyatakan, logo Bank Indonesia di pecahan uang rupiah bukan merupakan gambar palu arit seperti yang dinyatakan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.</p> <p>"Padahal, BI sudah menyampaikan ada sistem baru pengamanan hologram di uang baru, namanya rectoverso, jadi dua mata sisi itu berbeda, tetapi apabila diterawang ada lambang BI,"</p> <p>"Kami kenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, itu ujaran kebencian dan kebohongan, tetapi nanti kami melengkapi bukti itu".</p>
8.	Arbonas Hutabarat	Manager Bank Indonesia	<p>Sehubungan dengan maraknya informasi di media sosial yang mengaitkan beberapa tanda di uang Rupiah dengan simbol-simbol terlarang, dengan ini Bank Indonesia menegaskan bahwa informasi atau penafsiran tersebut tidak benar.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya agar uang</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>Rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan memiliki ciri pengaman yang cukup mudah dikenali masyarakat sekaligus melindungi uang dari unsur pemalsuan. Unsur pengaman ini secara terus menerus telah disosialisasikan oleh Bank Indonesia, termasuk di seluruh wilayah NKRI, dan juga dapat dilihat di website Bank Indonesia.</p> <p>Salah satu unsur pengaman yang ada dalam uang Rupiah adalah gambar saling isi atau Rectoverso. Unsur pengaman ini telah digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1995. Rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas yang membuat sebuah gambar berada di posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan belakang. Apabila dilihat tanpa diterawang, gambar akan terlihat seperti ornamen yang tidak beraturan. Namun apabila diterawang, Rectoverso akan membentuk sebuah gambar yang utuh.</p> <p>Jika diterawang, Rectoverso pada uang Rupiah akan membentuk lambang BI (singkatan dari Bank Indonesia). Rectoverso tidak dirancang untuk membentuk atau dimaknai sebagai gambar atau simbol lain, selain lambang BI. Selain pada uang kertas Rupiah, unsur pengaman Rectoverso juga digunakan oleh negara-negara lain seperti pada uang kertas</p>

NO.	NAMA	JABATAN	RESPON
			<p>Malaysia Ringgit (membentuk ornamen bunga), dan uang kertas Euro (membentuk ornamen nilai nominal).</p> <p>Selain Rectoverso, beberapa unsur pengaman lain yang terdapat dalam uang Rupiah antara lain adalah tanda air, benang pengaman, tulisan mikro, tinta berubah warna, dan gambar tersembunyi.</p> <p>Dengan memahami unsur-unsur keamanan dalam uang, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali keaslian Rupiah dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber beritanya.</p>
9.	<p>Irjen Mochamad Iriawan</p>	<p>Kapolda Metro Jaya</p>	<p>"BI sudah menyampaikan ada sistem baru pengamanan hologram di uang baru, namanya rectoverso, jadi dua mata sisi itu berbeda, tetapi apabila diterawang ada lambang BI".</p> <p>"Kami kenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, itu ujaran kebencian dan kebohongan, tetapi nanti kami melengkapi bukti itu".</p>

F. Bagaimana pengguna media sosial dan media online menafsirkan Regulasi pemerintah tentang Hoaks

1. Profil Informan

Peneliti memilih lima Informan dari berbagai unsur masyarakat dengan latar belakang yang berbeda sebagai Representasi dari masyarakat pengguna media sosial dan online dalam penelitian ini terkait persoalan bagaimana pengguna media sosial dan media online menafsirkan regulasi pemerintah tentang hoaks. Peneliti mengajukan lima pertanyaan kepada masing-masing informan untuk mengetahui penafsiran regulasi pemerintah tentang hoaks, yaitu :

1. Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?
2. Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah?
3. Apakah ada ke ragu raguan dalam menyampaikan informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?
4. Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan?
5. Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan?

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Reza Aditya (Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar)

Reza Aditya adalah seorang mahasiswa semester akhir jurusan ilmu komunikasi UIN Alauddin Makassar, dalam kesehariannya sebagai mahasiswa, Reza juga aktif dalam berorganisasi. Beberapa organisasi yang diikutinya adalah Himpunan Mahasiswa Islam Cab. Gowa Raya, IPMIL Raya dan salah satu UKM dikampusnya. Ia termasuk salah satu mahasiswa yang kritis melihat kondisi disekitarnya, ia menganggap bahwa tanggung jawab seorang mahasiswa adalah menjadi fungsi pengawal dari kebijakan pemerintah agar kebijakan yang dibuat mampu mensejahterakan masyarakat.

2. Dr. Aprizal, S.Kom., SE., M.M. (Dosen Stmik Dipanegara Makassar)

Pak Aprizal, begitu sapaannya, adalah seorang tenaga pengajar disalah satu universitas swasta di makassar, ia adalah alumni Program Doktoral Universitas Negeri Makassar. Aprizal adalah seseorang yang menaruh perhatian tinggi pada dunia pendidikan, ia terkenal sebagai sosok yang low profile ditataran mahasiswanya. Dalam wawancaranya dengan peneliti ia menyampaikan bahwa Regulasi yang dibuat pemerintah harus dibarengi dengan literasi yang baik dimasyarakat agar tidak menimbulkan multitafsir dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, ia juga sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap penegakan hukum dinegara kita yang terkesan tajam kebawah namun tumpul ke atas.

3. Faisal Hamdan Al-Katiri (Pimred Inikata.com)

Kak ical begitu sapaan akrabnya, adalah seorang pimpinan redaksi dari salah satu media online yang berkantor di Makassar. Sebagai seseorang yang bekerja di dunia media ia menyampaikan bahwa di era banjir informasi ini kita dituntut untuk lebih berhati-hati lagi dalam menerima atau mengonsumsi informasi. Apalagi di tahun politik ini menurut dia ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Dia berharap, dalam proses penerimaan informasi itu masyarakat harus bisa membedakan mana informasi yang berguna dan dapat dipercaya dan mana yang tidak yaitu dengan cara mengaktifkan fungsi saring terlebih dahulu sebelum sharing informasi.

4. Solihin Mansyur (ketua umum PP Pemilar)

Solihin Mansyur adalah seorang ketua umum sebuah Organisasi Kedaerahan (Organda) dia juga tercatat sebagai mahasiswa sekaligus Aktifis di kampus UIM Makassar yang juga sering aktif dalam mengadvokasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah asalnya yaitu Kabupaten Luwu Utara. Mahasiswa semester akhir ini menganggap bahwa mahasiswa adalah agen pelayan bagi masyarakat sehingga dia mewakafkan sebagian dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat di daerahnya. Solih begitu sapaan akrabnya, juga menyampaikan pendapatnya terkait maraknya informasi-informasi bohong belakangan ini di media sosial dan online. Menurutnya pemerintah

dalam hal ini Kominfo harus tampil sebagai instansi negara yang netral dalam mengambil tindakan terkait kebijakan di dunia maya agar masyarakat dapat benar-benar terlindungi oleh aturan yang dibuat dan tidak berat sebelah dalam menentukan suatu kebijakan.

5. Abdi Akbar (Direktur Politik PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Bang Abdi sapaan akrabnya, dia adalah direktur bagian politik pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berkantor di Jakarta. Dia adalah pemuda yang gencar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dalam wawancaranya bersama peneliti dia menyampaikan bahwa penyebaran informasi adalah hal yang penting untuk menjadi perhatian utama pemerintah pada era sekarang ini. Menurutnya, kualitas masyarakat itu ditentukan oleh kualitas informasi yang diperoleh masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pemerintah harus hadir sebagai patron dalam penyebaran informasi di negara kita.

2. Proses peneliti dalam mewawancarai informan (Menemukan Informan Penelitian)

1. Reza Aditya

Informan peneliti yang pertama bernama Reza Aditya. Peneliti sudah lama mengenal Reza karena Reza adalah rekan sekampung halaman peneliti. Oleh karena itu dalam proses mewawancarai informan, peneliti tidak terlalu mengalami kesulitan untuk bertemu dan melakukan proses wawancara. Peneliti dalam hal ini hanya menjelaskan kepada calon

informan terkait hal apa yang akan diwawancarakan kepadanya, yaitu terkait “Penafsiran pengguna media sosial dan online terkait kebijakan pemerintah tentang UU ITE” setelah mendengar penjelasan peneliti melalui chat di jejaring Whatsapp, informan pun setuju dan paham atas apa yang ingin di wawancarakan oleh peneliti. Akhirnya, setelah sepakat mengatur waktu dan tempat untuk bertemu yaitu di salah satu warkop di daerah Perintis kemerdekaan tepatnya di pintu 0 unhas kami lalu bertemu di hari dan waktu yang telah ditetapkan yaitu pada hari itu juga hari selasa 9 oktober 2018 pukul 17.00 WITA. Berikut adalah potongan percakapan peneliti dan informan melalui jejaring Whatsapp.



Setelah bertemu dilokasi dan waktu yang telah ditentukan, peneliti dan informan bercakap-cakap ringan terlebih dahulu mengenai fokus wawancara, sembari memesan makanan dan minuman yang akan

menemani kami pada saat wawancara berlangsung nanti. Setelah kurang lebih 15 menit lamanya, peneliti akhirnya berinisiatif untuk langsung melakukan wawancara dengan informan. Pada saat proses wawancara sedang berlangsung, peneliti menyampaikan kepada informan untuk berhenti sejenak karena tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18.15 WITA, lalu kami pun bersegera untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim melakukan sholat magrib secara berjamaah. Setelah sholat selesai peneliti pun melanjutkan wawancara dengan informan. Dalam proses wawancara tak sedikit pula informan menyampaikan beberapa pernyataannya terkait apa yang menjadi fokus penelitian dari peneliti, berikut pernyataan informan mengenai regulasi pemerintah tentang hoaks (UU ITE) :

“Hoaks adalah fenomena yang sudah lazim di era milenial ini, hampir setiap hari kita menemukan hal ini melalui perangkat smartphone kita. dewasa ini hoaks dan ujaran kebencian dijadikan sebagai alat untuk membentuk opini publik dengan tujuan mencapai kekuasaan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, dalam proses meliterasi masyarakat terkait berita bohong dan ujaran kebencian tidak semata-mata hanya menjadi domain dari pemerintah saja, akan tetapi fungsi memberi literasi informasi kepada masyarakat juga menjadi tanggung jawab mahasiswa sebagai kaum intelektual agar supaya masyarakat terhindar dari paparan informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian yang sangat massif tersebar di jejaring media sosial dan online belakangan ini”.
(Hasil kutipan wawancara, selasa 9 Oktober 2018)

Setelah proses wawancara selesai, peneliti pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada informan karena sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Setelah peneliti mengucapkan rasa terima

kasihnya akhirnya informan pun terlebih dahulu berpamitan kepada peneliti karena ada beberapa kegiatan informan di tempat lain yang harus diselesaikan.

2. Dr. Aprizal, S.Kom., SE., M.M.

Informan peneliti yang kedua bernama Aprizal. Sama seperti informan yang pertama informan peneliti yang kedua ini juga memiliki kedekatan dengan peneliti karena beliau pernah menjadi dosen pada saat peneliti menjalani proses perkuliahannya di jenjang S1 dulu, alasan peneliti memilih informan menjadi narasumber yang kedua karena informan adalah praktisi dan ahli dibidang IT, oleh karena itu peneliti menganggap informan layak untuk diwawancarai karena fokus penelitian ini juga berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di ruang lingkup IT itu sendiri. Setelah memutuskan keinginan peneliti untuk mewawancarai informan, peneliti pun berinisiatif untuk segera menghubungi informan melalui jejaring Whatsapp dengan harapan dapat bertemu sesegera mungkin karena peneliti paham akan kesibukan informan yang padat selaku dosen di kampus tempatnya mengajar. Setelah peneliti membuka komunikasi melalui jejaring whatsapp, akhirnya informan menanggapi dengan senang hati dan mengatakan punya banyak waktu kalau peneliti yang meminta, sebab informan menganggap bahwa peneliti adalah orang terdekat yaitu sebagai murid sekaligus juniornya di kampus dulu. Dengan nada bercanda informan pun

menyanggupi untuk bertemu melakukan wawancara dengan peneliti pada keesokan harinya sehari setelah peneliti menyampaikan keinginannya untuk melakukan wawancara dengan informan. Berikut adalah potongan percakapan peneliti dengan informan melalui jejaring Whatsapp.



Dalam percakapan diatas, informan menyanggupi untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 1 November 2018 pukul 13.00 siang di kampus tempat ia mengajar. Setelah menyepakati waktu dan tempat, keesokan harinya peneliti pun segera berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan wawancara. Setibanya disana peneliti langsung menuju ruangan informan. Pada awalnya informan sempat bertanya terkait kepentingan peneliti melakukan wawancara, peneliti pun menjelaskan bahwa wawancara ini untuk kebutuhan tesis peneliti yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penafsiran pengguna media sosial dan online

terkait kebijakan pemerintah tentang hoaks (UU ITE). Akhirnya setelah melakukan diskusi yang cukup panjang di awal, informan pun menyatakan siap untuk diwawancarai. Dalam proses wawancara ini informan juga menyampaikan pendapatnya terkait regulasi pemerintah tentang hoaks ini.

Berikut pernyataannya :

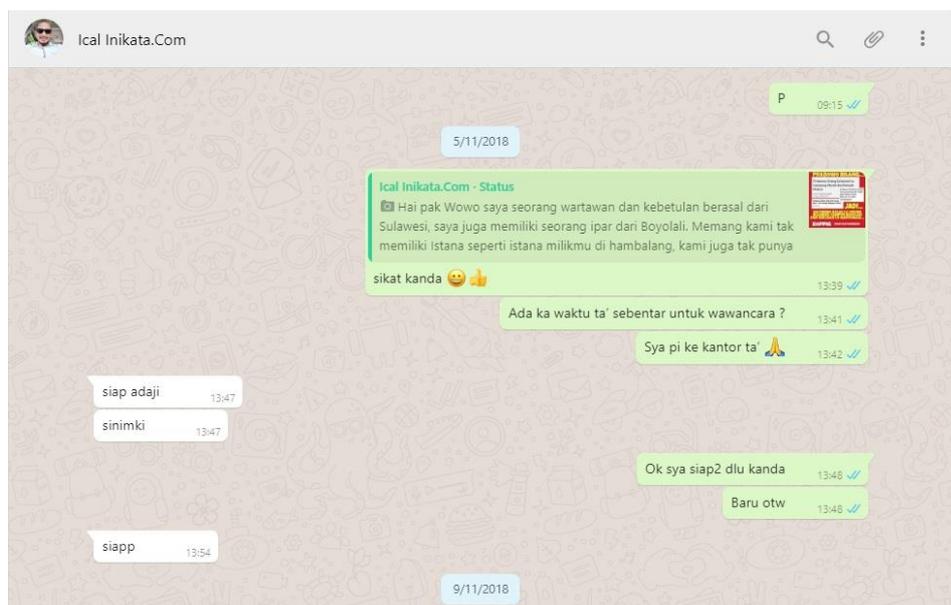
“UU ITE itu kan mengatur tentang cara kita bermedia sosial, sebenarnya itu kan sudah bagus karena pemerintah menerapkan undang-undang itu agar supaya kita sebagai pengguna media sosial lebih berhati-hati dalam berucap, menyampaikan informasi atau menyebarkan informasi karena ada hukum yang mengatur dan itu saya rasa sudah cukup baik apabila aturan itu betul-betul diterapkan dalam prosesnya. Aturan ini sebenarnya berfungsi sebagai bentuk ancaman dan rem buat kita sebagai pengguna media sosial dan online. Akan tetapi, saya melihat penegakan hukum di negara kita ini terkadang masih tumpang tindih dalam proses penegakannya yang saya lihat terkadang dalam prosesnya itu selalu tajam kebawah namun tumpul keatas, itulah kemudian menurut saya yang menjadi masalah dalam hal ini. (Hasil kutipan wawancara, Kamis 1 November 2018)

Setelah proses wawancara selesai peneliti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada informan karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara, akhirnya peneliti pun berpamitan kepada informan.

3. Faisal Hamdan Al-Katiri

Selanjutnya, informan peneliti yang ketiga adalah Faisal Hamdan Al-katiri seorang Pimred (pimpinan redaksi) disalah satu media online yang berkantor di Makassar. Peneliti dan informan sebelumnya sudah pernah saling kenal dengan informan karena pernah tergabung dalam salah satu organisasi kemahasiswaan.

Untuk sampai pada proses wawancara, peneliti menghubungi informan melalui jejaring Whatsapp dengan keinginan untuk bertemu dan melakukan wawancara. Peneliti menyanyakan kesediaan waktu informan untuk melakukan wawancara dan menawarkan untuk langsung datang ke kantor informan. Setelah menerima pesan peneliti melalui jejaring whatsapp, informan pun menyatakan kesanggupannya untuk melakukan wawancara pada tanggal 5 November 2018 pukul 13.00 WITA dikantornya. Berikut adalah potongan percakapan peneliti dengan informan melalui jejaring Whatsapp.



Akhirnya peneliti pun segera menuju ke kantor informan yang bertempat di jalan Hertasing no.54 Makassar. Setibanya disana, peneliti disambut oleh informan dan mempersilahkan masuk kedalam ruangnya. Pada awal percakapan, informan

menanyakan kepada peneliti terkait keinginan peneliti untuk melakukan wawancara, kemudian peneliti pun menjelaskan bahwa wawancara ini bertujuan untuk melihat penafsiran masyarakat pengguna media sosial dan online terkait kebijakan pemerintah tentang hoaks (UU ITE). Setelah memberikan penjelasan kepada informan akhirnya proses wawancara pun berlangsung. Proses wawancara berlangsung sangat menarik karena informan menyampaikan argumennya dengan sangat percaya diri dan lantang namun tetap dalam kondisi yang tenang dan terkendali hal ini bisa terjadi juga tentunya didukung oleh kemampuan peneliti dalam berkomunikasi dengan informan. Berikut pendapat informan terkait regulasi pemerintah tentang hoaks (UU ITE) :

“Yang saya pahami tentang UU ITE apalagi yang baru-baru ini telah direvisi oleh pemerintah di DPR, itu sama sekali pembahasannya tidak pernah dibuka ke publik atau diperuntukan untuk diakses ke publik nanti kemudian setelah jadi baru diumumkan ke publik tentang apa-apa saja yang sudah direvisi. Nah, inilah yang menjadi persoalan terkait UU ITE ini bahwa ada kecenderungan bahwa UU ITE ini bisa jadi adalah suatu hal yang sangat politis terlebih kasus-kasus yang terkait UU ITE itu selalu hadir dan selalu lahir di masa-masa tahun politik. Oleh karena itu saya merespon aturan ini dengan kekhawatiran yang berlebih, pertama ada beberapa hal di dalam tubuh dari undang-undang ini yang terkesan memberi kekuasaan kepada penegak hukum dan pemerintah untuk menghapus sebuah konten secara sepihak yang mungkin saja konten itu hanya sebatas kritik masyarakat kepada pemerintah namun dianggap sebagai suatu hal yang dapat mendiskreditkan instansi atau pemerintah. Sebagai contoh yaitu penghapusan kewenangan dari pengadilan untuk menangkap pelaku itu dihapuskan jadi ada ruang bagi

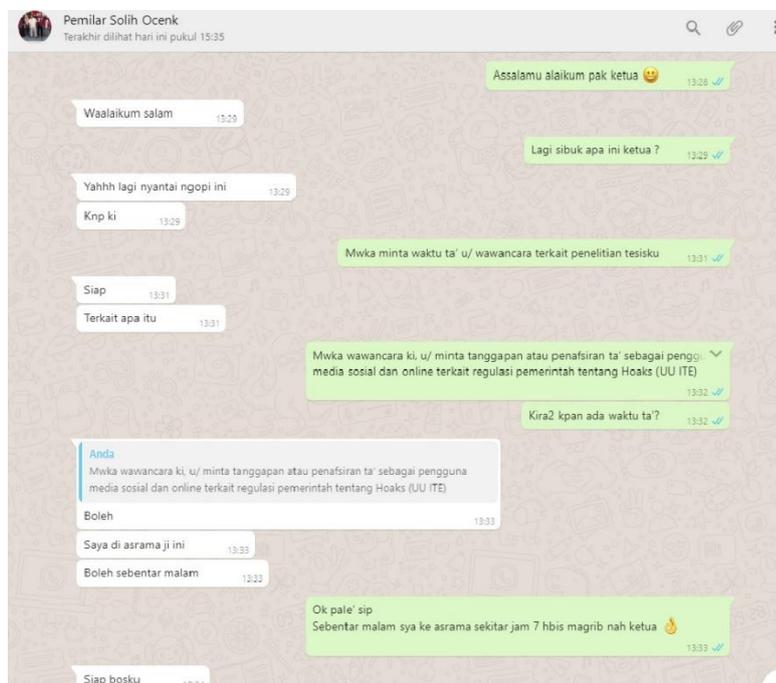
penegak hukum untuk langsung menahan pelaku. Selanjutnya pemerintah juga diberi kekuasaan atau otoritas untuk menghapus konten-konten atau artikel yang dinilai melanggar hukum hal ini bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk menghapus apa saja yang tidak mereka inginkan atau dianggap berbahaya dan mempengaruhi elektabilitas pemerintah itu sendiri". (Hasil kutipan wawancara, senin 5 November 2018).

Dalam proses mendapatkan informasi penelitian, peneliti menempatkan diri murni sebagai peneliti tanpa mengajukan opini atau pendapat pribadi terkait apa yang diwawancarakan kepada informan. Setelah proses wawancara selesai informan menyampaikan kepada peneliti untuk tinggal sejenak melakukan diskusi sembari menikmati secangkir kopi yang disediakan oleh salah satu karyawan kantornya. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 17.00 akhirnya dengan segala kerendahan diri peneliti pun berpamitan kepada informan dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.

4. Solihin Mansyur

Informan peneliti yang keempat adalah Solihin Mansyur. Dalam prosesnya, peneliti menghubungi informan melalui jejaring Whatsapp untuk meminta kesediaan informan melakukan wawancara. Pada awalnya, peneliti menanyakan terkait kesediaan waktu kepada informan untuk melakukan wawancara terkait penelitian ini. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh informan dengan menyatakan kesanggupannya untuk melakukan wawancara. Ada beberapa kesamaan dengan beberapa

informan sebelumnya yaitu informan menanyakan terlebih dahulu perihal apa yang akan diwawancarakan oleh peneliti kepada informan. Akhirnya peneliti pun menjelaskan secara singkat mengenai apa yang akan diwawancarakan. Berikut adalah potongan percakapan peneliti dengan informan melalui jejaring Whatsapp :



Setelah melakukan kesepakatan untuk bertemu melakukan wawancara pada hari Selasa 20 november 2018 pukul 19.00 WITA, akhirnya peneliti pun berangkat ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Setibanya dilokasi tersebut akhirnya peneliti pun bertemu dengan informan. Sebelum melakukan wawancara peneliti dan informan sedikit bercakap-cakap mengenai hal yang akan diwawancarakan untuk memperlancar proses wawancara dan akhirnya wawancara pun dimulai. Setelah wawancara selesai, peneliti sempat menanyakan

kepada informan mengenai tanggapannya terkait fenomena hoaks dan kebebasan informasi yang ada di Indonesia. Informan pun menyampaikan beberapa tanggapannya terkait fokus penelitian dari peneliti. Berikut tanggapannya :

“Kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Proses berekspresi dan menyatakan pendapat sekarang ini tidak hanya terjadi di dunia nyata atau riil namun juga terjadi di dunia maya. Saya melihat belakangan ini, ada banyak masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam situasi politik melalui media sosial dan online. Ada banyak kritik maupun fitnah yang dilontarkan melalui jejaring sosial. Hal ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap perpolitikan di negara kita baik itu secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, saya menganggap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo menjadi sangat penting mengingat belakangan ini sangat marak kita jumpai berita-berita atau informasi-informasi yang belum terbukti kebenarannya bahkan cenderung bohong itu menyebar melalui media sosial dan online dan efeknya begitu berbahaya menurut saya pribadi. Perlu menjadi catatan juga bahwa pemerintah dalam proses pengawasannya harus mengedepankan independensinya sebagai negara agar masyarakat dapat benar-benar terlindungi dan terhindar dari paparan informasi-informasi bohong ini. Tentunya tanpa harus mencederai kebebasan berpendapat itu sendiri. (Hasil kutipan wawancara, Selasa 20 November 2018).

Setelah mendengar tanggapan dari informan, akhirnya peneliti pun menyatakan untuk undur diri dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah diberi kesempatan melakukan wawancara kepada informan. Pernyataan peneliti itu pun ditanggapi dengan ucapan terima kasih pula dari informan.

5. Abdi Akbar

Informan peneliti yang kelima atau terakhir adalah Abdi akbar. Abdi akbar adalah informan yang sudah peneliti kenal sebelumnya. Dalam proses untuk melakukan wawancara, peneliti menghubungi informan juga melalui jejaring Whatsapp seperti kebanyakan informan lainnya. Dalam percakapan itu peneliti menanyakan tentang kesediaan waktu dari informan untuk melakukan wawancara. Akhirnya setelah menerima pesan dari peneliti, informan pun menyatakan kesediannya untuk melakukan wawancara dengan peneliti dengan ketentuan peneliti dapat melakukan wawancara ketika informan sudah berada di Makassar pada tanggal 30 November 2018 karena informan masih berada di Jakarta pada saat itu. Setelah menerima informasi dari informan, peneliti pun menyepakati terkait apa yang disampaikan oleh informan. Berikut percakapan peneliti dan informan melalui jejaring Whatsapp:



Pada hari jumat pukul 13.00 Wita, peneliti pun berinisiatif untuk kembali menghubungi informan melalui panggilan telfon. Dalam percakapan di telfon informan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di Makassar namun baru bisa melakukan wawancara pada malam hari pukul 19.00 wita dirumahnya setelah kegiatannya selesai. Peneliti pun menyepakati terkait apa yang disampaikan informan. Akhirnya pada malam harinya, peneliti pun berangkat ke kediaman informan yang bertempat di Jalan Kijang no 65 Makassar. Setelah tiba dilokasi, peneliti diterima dengan baik oleh informan dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah untuk melakukan wawancara. Dalam proses melakukan wawancara, informan juga sempat menyampaikan pendapatnya terkait regulasi pemerintah tentang Hoaks (UU ITE). Berikut penjelasannya :

“Saya rasa regulasi pemerintah (UU ITE) ini cukup bagus, karena akhir-akhir ini saya melihat media sosial kita khususnya di Indonesia seperti sudah tidak ada batasan dalam penggunaannya. Dengan mudah saja orang menyebarkan berita bohong, mencaci maki, menebar kebencian, memfitnah dan sebagainya di media sosial. Ini tentu menjadi hal yang sangat disayangkan terjadi di negara kita. Jadi diharapkan dengan adanya UU ITE ini dapat mengatur jalannya proses bermedia sosial dengan baik di negara kita. Dengan catatan yang saya sebutkan sebelumnya, aturan ini harus benar-benar mengena pada sasarannya yaitu dengan fungsi melindungi segenap masyarakat dari bahaya dan ancaman di dunia maya dan bukan justru menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya”. (Hasil kutipan wawancara, Jumat 30 November 2018).

Setelah proses wawancara selesai, peneliti pun menyatakan rasa terima kasih terhadap informan karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara.

**D. Matriks Penafsiran Pengguna Media Sosial dan Media Online
terkait Regulasi Pemerintah tentang Hoaks**

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1.	Reza (Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar)	Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?	UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Namun, pasal ini justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Pasalnya, jika ada seseorang yang merasa tersinggung dengan status, tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Terkadang Sekedar curhat, keluhan, atau kritik bisa dengan mudah diseret ke ranah pidana. Biasanya ini terjadi pada masyarakat biasa yang mengkritik kebijakan atau tingkah laku pemerintah melalui media sosial.
		Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang	UU ITE dibuat hanya untuk melindungi rezim penguasa, alasannya, karena menurut saya UU ITE dibuat seakan-akan

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
		dikeluarkan oleh pemerintah ?	hanya dijadikan sebagai tamen pada saat ada banyak kritikan terhadap rezim penguasa. Pada dasarnya UU ITE hanya dijadikan sebagai alat untuk melindungi penguasa dari kebobrokannya. Karena menurut saya UU ITE hanya berlaku dan melindungi pada orang-orang yang berpengaruh saja.
		Apakah ada ke ragu ragu dalam menyampaikan informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?	Ada keragu raguan, sebagai seseorang yang sudah mengetahui literasi tentang informasi seharusnya bijak dalam menyebarkan informasi dan selalu melihat sesuatu dari sudut pandang intelektual dalam menyebarkan informasi agar tidak memperkeruh suasana berbangsa kita demi menjaga persatuan dan kesatuan kita.
		Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan ?	Sering sekali, ini disebabkan banjir informasi yang tidak dibarengi dengan literasi terkait informasi itu sendiri, salah satu penyebabnya adalah kebebasan informasi itu. Ini disebabkan

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			karena iklim politik kita hari ini sedang memanas dan salah satu media penyebarannya adalah media sosial.
		Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan ?	Whatsapp, instagram, facebook, youtube.
2.	Dr. Aprizal,S.Kom., S.E.,M.M. (Dosen STMIK Dipanegara Makassar)	Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?	UU ITE itu berisi tentang aturan yang mengatur kebebasan kita dalam bermedia sosial, kinerja pemerintah dalam melahirkan UU ITE sya rasa sudah cukup bagus karena UU ITE membuat kita menjadi berhati-hati dalam berucap dan menyebarkan informasi di media sosial karena ada hukum yang mengatur.
		Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah?	Kalau memang UU ITE itu diterapkan sebagaimana mestinya sya rasa sangat bagus sekali karena dengan hadirnya UU ITE kita memiliki tolak ukur atau aturan yang mengikat dan membatasi kita dalam bermedia sosial. akan tetapi yang jadi pertanyaan apakah UU itu sudah

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			<p>diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa kondisi hukum dinegara kita ini selalu tajam kebawah namun tumpul keatas. Dan juga parahnya hukum dinegara kita tidak bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku terkhusus terkait pasal-pasal yang tercantum didalam UU ini, karena sya melihat selama ini UU ITE ini belum berlaku sepenuhnya masih tumpang tindih karena ada beberapa pasal yang sifatnya karet.</p>
		<p>Apakah ada ke ragu raguan dalam menyampaikan informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?</p>	<p>iya ada, karena dewasa ini semakin banyak hoaks yang muncul khususnya di media sosial dan hal itu juga selalu menjadi pembahasan yang hangat akhir-akhir ini, juga pihak pemerintah dengan sangat gencar dalam mengkampanyekan tentang bahaya berita hoaks sehingga membuat kita sebagai masyarakat lebih waspada lagi dalam menyebarkan informasi yang kita</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			<p>dapatkan. Efek dari hal ini sekarang saya hanya selalu membagikan informasi-informasi yang sifatnya membangun atau bersifat memotivasi karena walaupun kebenarannya belum jelas namun sifat dari informasi itu sudah bagus yaitu memotivasi orang untuk menjadi lebih baik lagi.</p>
		<p>Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan ?</p>	<p>Sering sekali, saya sering mengalami pada saat membuka facebook ada banyak sekali berita-berita yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan, seperti contoh baru-baru ini ada kejadian tentang pesawat lain yang jatuh setelah kejadian pesawat Lion air kemari, pada informasi itu dijelaskan bahwa pesawat itu baru-baru saja mengalami kecelakaan namun setelah diverifikasi dengan mencari sumber-sumber yang lain, terbukti bahwa itu adalah berita bohong atau Hoaks karena kejadian pesawat</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			yang dimaksudkan tadi itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang sangat penting untuk melakukan penyaringan sebaik mungkin dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial.
		Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan ?	Whatsapp, facebook, instagram, Youtube.
3.	Faisal Hamdan Al-katiry, S.E. (Pimred Inikata.com)	Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?	Yang saya pahami tentang UU ITE, apalagi yang terbaru yang baru direvisi di DPR itu sama sekali pembahasannya terkesan tidak transparan karena tidak umumkan ke publik nanti ketika sudah selesai baru diumumkan ke publik tentang apa-apa saja yang direvisi dan hal ini yang menjadi permasalahan menurut saya bahwa ada kecenderungan yang sangat politis didalam penyusunannya terlebih beberapa kasus terkait pelanggaran UU ITE ini selalu

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			berhubungan dengan konteks perpolitikan akhir-akhir ini yang dimana tahun ini adalah tahun politik.
		Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah ?	Respon saya tentu ada sebuah kekhawatiran berlebih, yang dimana didalam UU ITE ini ada kewenangan yang berlebih yang diberikan kepada pemerintah dalam hal penghapusan konten-konten atau artikel-artikel yang sebenarnya mungkin kritis kepada pemerintah namun dianggap mendiskreditkan instansi-instansi pemerintahan bahkan dianggap mampu mengganggu stabilitas negara. Diantaranya juga penghapusan kewenangan pengadilan untuk menangkap dan menahan pelaku menjadi kewenangan pihak kepolisian secara langsung untuk menindaki pelaku. Undang-Undang ini bisa menjadi senjata pemerintah untuk bertindak semena-

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			mena dengan alasan menjalankan aturan yang berlaku.
		Apakah ada ke ragu raguan dalam menyampaikan informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?	Pasti ada keragu-raguan dalam menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya apalagi dalam kapasitas saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia media, yang saya perhatikan dari media sosial belakangan ini informasi-informasi hoaks yang berkeliaran hari ini adalah informasi-informasi yang kebanyakan berasal dari kelompok-kelompok politik menjelang pilpres 2019. Dan maraknya informasi-informasi hoaks ini terkesan seperti sesuatu yang terstruktur dalam proses penyebarannya seperti sudah by design dari awal sehingga terbesar sampai kemana-mana.

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
		<p>Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan ?</p>	<p>Hampir setiap detik ditahun politik ini, itu terjadi dan marak menjelang pilpres 2019, di tahun politik ini informasi-informasi seperti ini menjadi subur, mirisnya lagi bahkan terkadang informasi yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar</p>
		<p>Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan ?</p>	<p>Whatsapp, facebook, twitter, LINE, dan Youtube.</p>
4.	<p>Solihin Mansyur (Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Utara)</p>	<p>Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?</p>	<p>Implementasi UU ITE ini ternyata memberikan dampak pada proses berdemokrasi di Indonesia. Pada dasarnya UU ITE lahir dengan alasan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Namun dalam prakteknya saya melihat banyak terjadi pergeseran. UU ITE justru menjadi senjata Untuk menjebloskan masyarakat ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Juga sering digunakan untuk</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			<p>membugkam kebebasan berekspresi di negara kita. Namun kita juga harus memahami bahwa dalam proses menyampaikan pesan atau berekspresi khususnya di media sosial kita juga harus tetap berada pada koridor yang berlaku. Karena kebebasan bukan berarti tanpa batasan.</p>
		<p>Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah ?</p>	<p>Respon saya adalah UU ITE ini harus tepat sasaran dalam pengaplikasiannya, dalam artian pemerintah harus jeli melihat permasalahan terkait UU ITE, jangan sampai salah sasaran. Pemerintah sebagai perangkat negara harus jeli melihat mana kasus-kasus yang memang harus ditindaki menggunakan UU ITE, jangan sampai masyarakat dirugikan sehingga tidak bisa lagi mengekspresikan dirinya di media sosial karena takut untuk terkena UU ITE. Sebagaimana yang kita ketahui, kita hidup di dalam negara yang</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			<p>menganut sistem yang demokratis sehingga dengan sendirinya kebebasan berekspresi itu dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara.</p>
		<p>Apakah ada ke ragu raguan dalam menyampaikan informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?</p>	<p>Tentu ada, dalam proses penyampaian informasi kembali (sharing) kita tentu harus mengecek kembali kebenaran informasi yang ingin kita bagikan. Karena kita tahu bahwa dampak dari informasi yang salah itu sangat membahayakan bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dalam mengambil tindakan terkait suatu isu atau informasi. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pemuda khususnya yang paham akan kondisi ini juga harus berlaku bijak dalam menyebarkan informasi. Seperti sebuah kutipan yang pernah saya dengar, bahwa kualitas sebuah masyarakat itu ditentukan oleh kualitas informasi yang diterima, dengan alasan itu dapat dipahami</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			bahwa kualitas masyarakat kita akan semakin buruk ketika selalu terpapar oleh informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
		Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan ?	Akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2019 saya sering sekali mendapatkan atau menjumpai informasi-informasi yang kebenarannya cenderung meragukan. Ini disebabkan persaingan politik dari kedua kubu sehingga masing-masing kubu ingin menjatuhkan lawan-lawan politiknya dengan cara menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar dengan tujuan meningkatkan elektabilitasnya. Informasi-informasi ini hadir setiap harinya melalui perangkat digital seperti smarthphone apalagi seperti yang kita ketahui dewasa ini masyarakat kita hidup dalam era teknologi yang setiap detiknya masyarakat kita selalu mengakses perangkat digital untuk mendapatkan informasi atau hanya

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			sekedar bercengkrama dengan teman jauh melalui media sosial. Dalam era inilah informasi-informasi yang salah terus berkembang dan menjadi subur.
		Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan ?	Whatsapp, Line, Facebook, Twitter, youtube, dan telegram.
5.	Abdi Akbar (Direktur Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)	Sejauh mana pemahaman anda tentang UU ITE?	Yang saya pahami tentang UU ITE yaitu undang-undang ini mengatur tentang bagaimana kita bermedia sosial dengan baik dan benar, namun perlu juga menjadi perhatian, apakah Undang-undang ini sudah sesuai dengan yang semestinya dalam artian aturan yang termuat didalamnya dapat benar-benar melindungi semua unsur atau elemen didalam masyarakat. Sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan dengan adanya UU ini. Karena aturan ini banyak menuai kontroversi dalam

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			pengaplikasiannya selama ini.
		Bagaimana Respon anda terkait UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah ?	<p>Saya rasa cukup bagus, karena akhir-akhir ini media sosial kita khususnya di Indonesia seperti sudah tidak ada batasan dalam penggunaannya. Dengan mudah saja orang menyebarkan berita bohong, mencaci maki, menebar kebencian, memfitnah dan sebagainya di media sosial. Ini tentu menjadi hal yang sangat disayangkan terjadi di negara kita. Jadi diharapkan dengan adanya UU ITE ini dapat mengatur jalannya proses bermedia sosial dengan baik di negara kita. Dengan catatan yang saya sebutkan sebelumnya, aturan ini harus benar-benar mengena pada sasarannya yaitu dengan fungsi melindungi segenap masyarakat dari bahaya dan ancaman di dunia maya.</p>
		Apakah ada ke ragu raguan dalam menyampaikan	Terkadang ada, namun ketika informasi itu bermuatan hal yang

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
		<p>informasi di media sosial ketika informasi yang ingin anda sampaikan belum terverifikasi kebenarannya?</p>	<p>lucu tidak ada keraguan dalam menyebarkannya, karena saya menganggap itu dapat menghibur. Namun apabila informasi itu bersifat penting tentu akan ada kehati-hatian dalam menyebarkannya, karena seperti yang kita tahu sekarang ini sudah mulai berlaku UU ITE yang didalamnya juga tercantum ancaman pidana bagi siapapun yang membuat dan mengedarkan informasi bohong ke publik. Jadi saya rasa perlu untuk tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi-informasi yang kita peroleh dari media sosial dengan melakukan fungsi menyaring informasi terlebih dahulu sebelum sharing.</p>
		<p>Sesering apa anda menerima informasi atau pesan-pesan melalui media sosial yang kebenarannya cenderung meragukan ?</p>	<p>Akhir-akhir ini saya rasa sering sekali, terutama informasi-informasi yang berhubungan dengan kondisi politik di negara kita sekarang ini. Juga tentang isu-isu agama yang banyak menyebar akhir-akhir ini pasca</p>

NO.	NAMA	PERTANYAAN	TANGGAPAN
			<p>gerakan 212 di jakarta. Seperti ada perpecahan yang terjadi di negara kita akibat dari perbedaan pilihan politik dan informasi-informasi yang tersebar ini sepertinya bersifat menjatuhkan bagi yang lainnya, namun belum bisa dipastikan kebenarannya. Seharusnya dalam kondisi ini pemerintah dalam hal ini KOMINFO harus hadir sebagai pengklarifikasi kebenaran sebuah berita atau informasi agar masyarakat dapat tercerahkan akibat maraknya informasi yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya.</p>
		<p>Ada berapa jenis media sosial yang anda gunakan ?</p>	<p>Whatsapp, Tinder, Line, Instagram, Telegram, dan Youtube.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan hasil wawancara mengenai hoaks dan kebebasan informasi, penelitian ini menemukan bahwa fenomena hoaks dan kebebasan informasi sangat erat kaitannya dengan penggunaan media sosial dan media online. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial dan media online menjadi alat perpanjangan tangan bagi pihak-pihak yang ingin menyebarkan informasi hoaks dengan motif tertentu serta dilakukan secara massif dan terstruktur dengan menggunakan provokasi-provokasi terhadap emosi masyarakat (Post-truth) untuk membentuk opini publik, sementara masyarakat sendiri belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pemilihan informasi yang diterimanya dari internet atau media sosial. Sehingga masyarakat mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita palsu. Rendahnya literasi berakibat pada rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan verifikasi dan akurasi atas informasi yang diterima.

2. kebijakan pemerintah dalam mengatur proses bermedia sosial dianggap belum mampu dan gagap dalam merespon percepatan informasi yang beredar melalui internet. Bahkan dalam menghadapi maraknya informasi hoaks, negara terkesan bimbang dan ragu, karena isu-isu yang

bermunculan banyak bersinggungan dengan politik kekuasaan. Sehingga ketika negara bertindak, mereka khawatir akan dituduh telah melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini harus tampil secara tegas dan mengambil peran strategis dalam bentuk regulasi untuk mengatur proses bermedia sosial di Indonesia yang berdampak pada proses demokrasi.
2. Dalam proses mencari dan menerima informasi di era teknologi saat ini, hendaknya masyarakat harus mengedepankan proses menyaring terlebih dulu informasi dengan sebaik-baiknya sebelum melakukan sharing terhadap informasi.
3. Pemerintah hendaknya melakukan proses literasi informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilih dan memilah, serta memproduksi dan mendistribusikan informasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir, Yasraf Piliang, 2005. *Transpolitika. Dinamika Politik di Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra

Amir, Yasraf Piliang, 2017. *Dunia Yang Berlari (Dromologi Implosi dan Fatamorgana)*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.

Amir, Yasraf Piliang, 2017. *Kecerdasan Semiotik*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka

Arief, Yovantra, dan Wisnu Prasetya Utomo, 2015. *Orde Media (Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru)*. Yogyakarta: INSISTPress dan Remotivi.

Berger dkk, 2016. *Handbook Ilmu Komunikasi*. Bandung: Nusa Media
Eriyanto. 2011. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan politik Media*. Yogyakarta: LKis

Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: rajawali Pers.

Cherian, George, 2016. *Pelintiran Kebencian*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

Danesi, marcel, 2004. *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra

Hardiman, F. Budi, 2010. *Ruang Publik (Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace)*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Holmes, David, 2005. *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mohamad, Goenawan, 2009. *Demokrasi dan Kekecewaan*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

Mulyana Deddy dan Solatun, 2013. *Metode penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan, 2011. *Komunikasi Politik (komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurudin, 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers

Ricoeur, Paul, 2014. *Teori Interpretasi (Membelah Makna Dalam Anatomi Teks)*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Schmidt Eric, dan Cohen Jared. 2014. *The New Digital Age*. Jakarta: KPG (kepuustakaan Populer Gramedia).

Sobur, Alex, 2003. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: remaja Rosdakarya.
West Richard dan Lynn Turner, 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba HUMANIKA.

Sobur, Alex, 2015. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Hardiman, F. Budi, 2018. *Demokrasi dan Sentimentalitas (dari “bangsa setan-setan”, radikalisme agama, sampai post-sekularisme)*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Kaid, Linda Lee, 2015. *Handbook Penelitian Komunikasi Politik*. Bandung: Nusa Media.

JURNAL, TESIS & DISERTASI

Galuh, I Gusti Agung Ayu Kade. Media Sosial Sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi.

Siswoko, Kurniawan Hari. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoaks.

Syahputra, Iswandi. Demokrasi Virtual dan perang siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia.

Juliswara, Vibriza. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial.

INTERNET

<https://geotimes.co.id/kolom/politik/demokrasi-hoax-dan-media-sosial/>

<http://www.remotivi.or.id/kabar/345/Selamat-Datang-di-Era-Post-Truth>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-computer-mediated-communication-dalam-ilmu-komunikasi/4369/2>

<http://analisiswacana2014.blogspot.com/2015/03/analisis-wacana-kritis-menurut-roger.html>

<https://www.viva.co.id/siapa/read/242-habib-rizieq-shihab>

<http://ipulstory.blogspot.com/2011/12/biografi-habib-rizieq-syihab-oleh-budi.html>

<https://kumparan.com/@kumparannews/habib-rizieq-ada-palu-arit-di-uang-baru>

<https://ekbis.sindonews.com/read/1170334/178/respons-sri-mulyani-soal-tudingan-uang-baru-mirip-logo-palu-arit-1484208702>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2831049/reaksi-peruri-soal-laporan-logo-palu-arit-di-rupiah>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2650371/penjelasan-bi-soal-isu-gambar-palu-arit-di-rupiah>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2826916/kasus-palu-arit-di-uang-rupiah-berlanjut-ini-tanggapan-kein>

<https://kumparan.com/@kumparannews/gubernur-bi-beri-penjelasan-soal-dugaan-logo-palu-arit-di-uang-rupiah>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/11/20152481/kapolda.metro.gambar.di.lembaran.uang.rupiah.bukan.palu.arit>

https://www.academia.edu/35586523/Sejarah_dan_Perjalanan_Partai_Komunis_Indonesia_PKI_

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_189116.aspx